



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

(LKjIP)



GERMAS

Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

Tahun
2021



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

(LKjIP)



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

Tahun
2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah** Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021 dapat tersusun. Kami sadari sepenuhnya bahwa penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah** Dinas Kesehatan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena proses pengumpulan dan validasi datanya belum sepenuhnya memanfaatkan sarana teknologi informasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang disajikan dalam **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah** ini berisi keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, serta kendala atau kekurangan yang ada. Selain itu, **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah** ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah** Dinas Kesehatan Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Secara eksternal, **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah** merupakan alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam rangka menuju terwujudnya *good governance*. Sedangkan secara internal, **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

merupakan salah satu alat evaluasi untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ini disajikan dalam bentuk cetakan, dan *softcopy* serta juga dapat diunduh di website dinkes.kedirikab.go.id sehingga memudahkan para pengguna (masyarakat) untuk mendapatkan publikasi ini.

Akhirnya penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah** ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan manfaat bagi peningkatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kediri .

Kediri, Maret 2022

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri



dr. AHMAD KHOTIB
Pembina Tingkat I
NIP. 197003242002121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	2
D. Dasar Hukum	4
E. Sistematika	5
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program.....	6
1. Visi	6
2. Tujuan	7
3. Sasaran	8
4. Strategi dan Arah Kebijakan	8
5. Program	9
B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Perbandingan Realisasi Kinerja	93
C. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Akhir Tahun Renstra	96
D. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	96
E. Pencapaian Kinerja Anggaran	97
F. Efisiensi Penyerapan Anggaran	98
BAB IV : PENUTUP	
A. Tinjauan Umum	99
B. Kesimpulan	99

Lampiran-lampiran

Rencana Strategis SKPD Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran kinerja (PK) Tahun 2021



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri menyusun Perencanaan Strategik untuk masa lima tahun dari tahun 2016 s/d 2021. Perencanaan Strategik Dinas Kesehatan disusun sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan dengan menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri, serta indikator-indikator penunjangnya.

Mengenai asas akuntabilitas, Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten selama Tahun 2021 kepada Bupati. Laporan akuntabilitas ini disusun dalam rangka pelaksanaan Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut di atas.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara mulai eselon II wajib memberikan laporan Akuntabilitas Kinerja.

Adapun secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2021. Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten selama tahun 2021.
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja serta masukan dalam perencanaan program di Dinas Kesehatan Kabupaten untuk kemudian diharapkan adanya perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten yang lebih baik di masa mendatang
- c. Menjadikan Dinas Kesehatan Kabupaten yang akuntabel sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif dan representatif serta dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dan lingkungan
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten.

C. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 45 tahun 2016 yang disempurnakan Kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2021, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang terdiri atas :

1. Bidang Kesehatan Masyarakat
2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Bidang Pelayanan Kesehatan
4. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya. Sedangkan Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Penyusunan Program; Sub Bagian Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan menurut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan
- f. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan
- g. Pembinaan UOBK RSUD dan UPT
- h. Pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan kesehatan
- i. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas :

- Kepala Dinas
- Sekretariat
- Bidang Kesehatan Masyarakat
- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Bidang Pelayanan Kesehatan
- Bidang Sumber Daya Kesehatan
- UOBK RSUD

- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021 didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya yang terdiri dari program-program kesehatan seperti tercantum dalam Dokumen Perubahan Anggaran (DPA) Tahun 2021 yang meliputi 5 Program dengan 19 Kegiatan dan 74 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang dan UPT

D. DASAR HUKUM

Sebagai Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah :

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Administrasi Negara.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja dengan susunan sebagai berikut :

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Strategis
 - Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program
- B. Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

Kesimpulan

Lampiran-Lampiran :

Rencana Starategis Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2021



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategi dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Masing-masing tugas dan fungsi ini dijabarkan lebih lanjut melalui program Sekretariat, Bidang, Sub Bagian/Seksi dan Fungsional. Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan didasarkan pada kondisi strategi, isu global serta perkembangan terkini serta adanya visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam menyusun rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan juga memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Sehingga Rencana Kerja Tahunan dapat tersusun secara realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Untuk mendukung pembangunan daerah, Dinas Kesehatan sebagai leading sektor pembangunan bidang kesehatan harus mendukung visi Bupati Kediri yaitu ***“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan Berkeadilan yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”***

maka rumusan misi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 sebagai pemersatu gerak ,langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir sebanyak 15 misi yaitu :

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Mempercepat pembangunan disektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.
5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan.
6. Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas, dan pendapat masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia sehat.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendapatan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah perdesaan, khususnya kaum perempuan
11. Mewujudkan Aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi.
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang.
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat
Dinas Kesehatan mempunyai kontribusi dalam pembangunan, terutama dalam Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan.

2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan pada umumnya

didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan dalam mendukung pembangunan bidang kesehatan. Tujuan dari pembangunan bidang kesehatan adalah “Meningkatkan Pelayanan Bidang Kesehatan yang Berkualitas Merata dan Terjangkau Bagi seluruh Masyarakat”

Dari tujuan tersebut terdapat dua indikator tujuan yaitu 1). Menurunkan angka kematian ibu; 2). Menurunkan angka kematian Bayi.

3. Sasaran

Sasaran strategis Dinas Kesehatan adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan indikator sasaran :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Persentase Keluarga Sehat

Tabel : 2.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran

	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan Pelayanan Bidang Kesehatan yang Berkualitas Merata dan Terjangkau Bagi seluruh Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu	1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		2. Angka Kematian Bayi		2. Presentase Keluarga Sehat

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2021, maka ditempuh melalui Kebijakan, Program dan Kegiatan yang direncanakan.

Adapun strategi yang direncanakan tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang sesuai Kompetensinya
2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan sara prasarana di puskesmas sesuai standar
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan

4. Meningkatkan peran serta masyarakat serta penyebaran media promosi kesehatan
5. Meningkatkan peran serta lintas sektor dalam upaya mewujudkan keluarga sehat
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kualitas pelayanan di bidang penanggulangan penyakit
7. Meningkatkan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada masyarakat
8. Meningkatkan kepesertaan masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan iuran

Untuk mewujudkan strategi, tersebut disusun arah kebijakan tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
2. Melaksanakan rekrutmen tenaga kontrak BLUD non PNS
3. Mengoptimalkan anggaran pengadaan alat kesehatan dan sarana prasarana
4. Mendorong fasilitas kesehatan terakreditasi
5. Mengoptimalkan pembentukan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
6. Mengoptimalkan kerja sama lintas sektor dalam upaya mewujudkan keluarga sehat
7. Mengoptimalkan peran lintas sektor dalam rangka penanggulangan penyakit
8. Meningkatkan kerja sama lintas sektor tentang kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN)

5. Program

Program yang ditetapkan tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

B. PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Setiap sasaran telah ditetapkan sejumlah indikator dan untuk memudahkannya disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU). Rumusan Indikator utama tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan Dokumen Perencanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 352.452.537.436,52 dengan 5 program, 19 kegiatan dan 74 sub kegiatan.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tahun 2021 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja. Untuk mengetahui indikator kinerja dan Indikator Kinerja Utama dan rencana tingkat capaian (target) dapat dilihat pada lampiran di bawah ini.

TABEL VI.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 5 (2021)			
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2		1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Pelayanan Bidang Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	Angka Kematian Ibu	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. IKM	1.02 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	78%	78%	207.508.877.899,5	178.924.260.670,1
	Angka Kematian Bayi		2. Persentase Keluarga Sehat	1.02 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	39.509.000,00	18.615.000,00
				1.02 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Rentra, Renja)	2 dokumen	2 dokumen	10.207.500,00	10.175.000,00
				1.02 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan dalam 1 tahun (Lap bulanan, semesteran, tahunan)	15 laporan	15 laporan	29.301.500,00	8.440.000,00
				1.02 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	83.298.507.051,00	79.859.915.729,00
				1.02 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	81.045.617.051,00	78.283.381.396,00
				1.02 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	93	93	1.911.250.000,00	1.421.474.333,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 5 (2021)			
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2		1	2	3	4	5	6	7
				1.02 . 01 . 2.02 . 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun	93	93	341.640.000,00	155.060.000,00
				1.02 . 01 . 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	52.428.520.400,00	41.788.402.847,00
				1.02 . 01 . 2.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah baju kerja yang diadakan	20	8	6.480.000,00	6.480.000,00
				1.02 . 01 . 2.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan yang mengalami peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan	80%	75%	52.422.040.400,00	41.781.922.847,00
				1.02 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.600.135.313,00	913.426.266,00
				1.02 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)	2	2	21.045.750,00	13.184.650,00
				1.02 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	17	5	1.058.250.063,00	624.363.765,00
				1.02 . 01 . 2.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)	4	4	82.996.800,00	43.087.860,00
				1.02 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis barang / bahan yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	80	80	169.271.300,00	114.135.991,00
				1.02 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan	7	7	104.211.000,00	43.304.270,00
				1.02 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan	2	2	3.900.000,00	2.400.000,00
				1.02 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dalam 1 tahun	500	325	14.941.000,00	8.194.580,00
				1.02 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dengan lintas program, lintas sektor dalam 1 tahun	150	71	145.519.400,00	64.755.150,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 5 (2021)			
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2		1	2	3	4	5	6	7
				1.02 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.393.389.851,00	718.898.399,00
				1.02 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi kegiatan pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun (kali)	12	12	1.440.000,00	16.000,00
				1.02 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)	12	12	951.659.851,00	396.987.015,00
				1.02 . 01 . 2.08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	118.000.000,00	83.222.200,00
				1.02 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	322.290.000,00	238.673.184,00
				1.02 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	529.641.600,00	374.390.037,00
				1.02 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun	10	10	27.500.000,00	16.675.300,00
				1.02 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang mendapatkan pemeliharaan dalam 1 tahun	10	10	223.591.600,00	197.730.187,00
				1.02 . 01 . 2.09 . 05	Pemeliharaan Mebel	Frekuensi pemeliharaan mebelair dalam 1 tahun (kali)	2	2	10.000.000,00	5.625.100,00
				1.02 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	148.400.000,00	50.189.450,00
				1.02 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	3	3	98.000.000,00	95.625.000,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 5 (2021)			
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2		1	2	3	4	5	6	7
				1.02 . 01 . 2.09 . 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	3	3	22.150.000,00	8.545.000,00
				1.02 . 01 . 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD	100%	100%	68.219.174.684,52	55.250.612.392,08
				1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD	37 puskesmas	37 puskesmas	68.219.174.684,52	55.250.612.392,08
				1.02 . 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kecamatan STBM	1%	0%	134.306.493.785,00	84.385.067.418,94
						Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	12%	41,6%		
						Indeks Keluarga Sehat	0,14	0,15		
						Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	78,5%	73,3%		
						Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin	15%	29%		
						AKI	41,64	138,46		
						AKB	6,87	7,16		
				1.02 . 02 . 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	100%	39.012.146.805,00	30.211.529.579,91
				1.02 . 02 . 2.01 . 02	Pembangunan puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	100%	100%	3.205.000.000,00	3.177.414.492,00
				1.02 . 02 . 2.01 . 06	Pengembangan Puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	16,7% (7/42)	24%	9.939.934.329,63	8.889.815.759,91

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 5 (2021)			
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2		1	2	3	4	5	6	7
				1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Meubelair Puskesmas	100% (100/100)	0%	880.165.599,37	680.385.725,00
						Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Umum Puskesmas	8 paket	8 paket		
						Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Gigi Puskesmas	7 paket	7 paket		
						Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas	41 paket	41 paket		
				1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kecukupan alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	77%	100%	10.979.425.796,00	7.518.355.569,00
				1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi	100 alat	49 alat	99.100.000,00	98.901.000,00
				1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman	76%	72,05%	5.276.931.340,00	2.204.583.646,00
						Jumlah item pengadaan obat , vaksin	50	57		
				1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah item pengadaan bahan habis pakai	7	12	8.275.719.740,00	7.359.025.579,00
				1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alkes/alat penunjang medik	37 puskesmas	37 puskesmas	286.096.000,00	283.047.809,00
				1.02.02.2.01.21	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya	Obat dan alkes yang di distribusikan dalam satu tahun	100%	100%	69.774.000,00	-
				1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)	78%	78%	93.666.656.808,00	53.182.099.769,03
						Persentase Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	57%	57%		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 5 (2021)			
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2		1	2	3	4	5	6	7
						Persentase tenaga kesehatan tradisional yang dibina	100%	100%		
						Persentase penyehat tradisional yang dibina	25,0%	29,0%		
						Persentase desa yang terbentuk Asman TOGA	22,00%	21,0%		
						Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	100%	100%		
						Persentase akses sanitasi layak	23%	95,5%		
						Jumlah tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat	6	6		
				1.02 . 02 . 2.02 . 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standart (K4)	89%	88%	1.491.315.846,00	838.207.436,00
				1.02 . 02 . 2.02 . 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standart	92%	90,45%	4.697.491.169,00	3.993.156.060,00
				1.02 . 02 . 2.02 . 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standart (KN2)	94%	93%	117.818.200,00	23.107.800,00
				1.02 . 02 . 2.02 . 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Balita dilayani sesuai standart	77%	72,50%	682.258.100,00	279.383.600,00
				1.02 . 02 . 2.02 . 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standart	55%	96,4%	447.609.173,00	202.067.254,00
				1.02 . 02 . 2.02 . 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	40%	32.920.000,00	15.008.000,00
				1.02 . 02 . 2.02 . 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standart	50%	77,30%	171.291.511,00	59.804.000,00
				1.02 . 02 . 2.02 . 08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar	10,70%	26,00%	Rp 40.522.000,00	10.000.000,00
				1.02 . 02 . 2.02 . 09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar	48,00%	93,00%	Rp 19.308.000,00	8.624.000,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 5 (2021)			
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2		1	2	3	4	5	6	7
				1.02 . 02 . 2.02 . 10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	119%	Rp 43.848.000,00	9.920.000,00
				1.02 . 02 . 2.02 . 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	32%	25,38%	194.050.200,00	96.952.200,00
						Persentase penemuan dan penanganan kasus TB	43%	39,30%		
						Persentase keberhasilan pengobatan TB	96%	33,33%		
				1.02 . 02 . 2.02 . 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	92%	84,86%	135.429.750,00	35.257.750,00
						Persentase Orang dengan HIV yang mendapatkan ARV	89%	79%		
				1.02 . 02 . 2.02 . 13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	100%	100%	10.712.934.639,00	2.973.429.946,00
				1.02 . 02 . 2.02 . 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vit A	88%	83,33%	4.397.130.527,00	2.216.875.630,00
						Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,50%	14,10%		
						Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	9%	7,19%		
						Prevalensi anemia pada ibu hamil	26%	14%		
				1.02 . 02 . 2.02 . 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	a. Jumlah Pos UKK yang terbentuk	40 Pos	49 Pos	299.506.200,00	196.287.000,00
						b. Persentase jumlah jamaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya	80%	48%		
						c. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga	37 puskesmas	37 puskesmas		
				1.02 . 02 . 2.02 . 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Tempat Pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar	68,73%	70,00%	8.699.319.629,00	8.185.054.289,00
						Persentase desa ODF	62,30%	77,90%		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 5 (2021)			
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2		1	2	3	4	5	6	7
						Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas airnya	78,20%	73,00%		
						Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis	70,00%	100,00%		
						Persentase Tempat-tempat umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar	82,50%	85,00%		
				1.02 . 02 . 2.02 . 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina	6	9	61.600.000,00	59.765.822,00
						Jumlah penyehat tradisional yang dibina	360	410		
						Jumlah desa yang terbentuk Asman TOGA	74	73		
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	37 puskesmas	37 puskesmas		
				1.02 . 02 . 2.02 . 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam	100%	100%	2.521.775.978,00	905.464.775,00
				1.02 . 02 . 2.02 . 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ODGJ ditangani sesuai standart	100%	100%	189.394.000,00	132.582.500,00
				1.02 . 02 . 2.02 . 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penderita HT ditangani sesuai standart	10,7%	26,0%	4.386.847.319,00	3.325.872.910,00
						Persentase Penderita DM ditangani Sesuai standart	48,0%	93,0%		
						Persentase WNI usia 15 - 59 tahun mendapatkan screening sesuai standart	100,0%	40,0%		
						Persentase desa yang melaksanakan Posbindu	88,6%	89,8%		
						Persentase sekolah yang melaksanakan KTR	44,6%	80,0%		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 5 (2021)			
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2		1	2	3	4	5	6	7
						Persentase Wanita Usia Subur yang melakukan deteksi dini penyakit Kanker payudara dan kanker leher rahim pada usia 30 sd 50 tahun	3,2%	2,4%		
						Persentase penemuan kusta pada anak	<5%	6,0%		
						Persentase cacat pada kasus kusta baru	<5%	1,6%		
						Persentase penderita kusta RFT-MB	95,0%	100,0%		
						Persentase penderita kusta RFT-PB	100,0%	100,0%		
						Persentase cakupan tatalaksana pneumonia balita	40,0%	40,0%		
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana Diare sesuai standart	80,0%	100,0%		
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan advokasi dan / sosialisasi Pengendalian PISP	60,0%	60,0%		
						Persentase Puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	65,0%	60,0%		
						Persentase Kasus Diare pada semua umur ditangani sesuai standart	50,0%	41,2%		
						Persentase Kasus Diare pada Balita ditangani sesuai standart	40,0%	35,2%		
						Persentase Bumil dilakukan (DDHB) Deteksi Dini Hepatitis B	70,0%	80,0%		
						Persentase bayi lahir dari Ibu reaktif HBsAg mendapat HBIg < 24 jam	100,0%	100,0%		
						Persentase bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg hasilnya Non Reaktif	100,0%	80,0%		
						Persentase kasus DBD ditangani sesuai standart	100,0%	100,0%		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 5 (2021)			
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2		1	2	3	4	5	6	7
						Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)	>=80%	81,0%		
						Persentase anak usia 1-12 Tahun mendapatkan obat Cacing	100,0%	98,6%		
				1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan	70%	72%	33.373.790.370,00	18.668.826.038,03
				1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah masyarakat /tokoh masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan NAPZA	0	0	50.394.750,00	48.494.500,00
						Jumlah pengadaan urine test	300	500		
				1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Presentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa	100%	100%	15.727.800,00	11.902.000,00
				1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan sehat	18 Kec.	26 Kec	243.630.000,00	99.336.000,00
				1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan preventif promotif, layanan persalinan	37 puskesmas	37 puskesmas	2.054.760.497,00	1.503.246.195,00
				1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan operasional fasyankes	37 puskesmas	37 puskesmas	15.730.329.370,00	8.470.161.324,00
				1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	21 puskesmas	21 puskesmas	1.421.160.000,00	
				1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	341	151	295.483.780,00	252.245.290,00
						Presentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	92,9%	80,6%		
						Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak dan Rubella	76,4%	80,7%		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 5 (2021)			
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2		1	2	3	4	5	6	7
				1.02 . 02 . 2.02 . 37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	100,0%	100,0%	1.139.010.000,00	561.067.450,00
				1.02 . 02 . 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan	37 puskesmas	37 puskesmas	59.520.000,00	59.520.000,00
				1.02 . 02 . 2.03 . 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen informasi yang disusun	38 dokumen	38 dokumen	59.520.000,00	59.520.000,00
				1.02 . 02 . 2.03 . 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	2 jamgan 37 pkm	2 jamgan 37 pkm	-	
				1.02 . 02 . 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100%	100%	1.568.170.172,00	931.918.070,00
						Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	5,4%	2,7%		
						Persentase keluarga yang mendapat intervensi	5,5%	5,9%		
						Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi	0%	0%		
						Persentase RS yang terakreditasi paripurna	21,43%	27,27%		
						Persentase Klinik Utama yang terakreditasi	0%	0%		
						Persentase lab Madya yang terakreditasi	0%	0%		
				1.02 . 02 . 2.04 . 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	2 puskesmas	1 puskesmas	1.377.666.372,00	776.525.789,00
						Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS	22.402 keluarga	23209 keluarga		
						Jumlah Klinik Pratama yg terakreditasi	0 klinik	0		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 5 (2021)			
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2		1	2	3	4	5	6	7
				1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah RS yang terakreditasi paripurna	3	3	190.503.800,00	155.392.281,00
						Jumlah Klinik Utama yang terakreditasi	0	0		
						Jumlah lab Madya yang terakreditasi	0	0		
				01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	70%	70%	6.435.308.533,00	5.577.257.256,00
				01.02.03.2.01	Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	Jumlah izin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan	100%	100%	-	
				01.02.03.2.01.01	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Perizinan praktek tenaga kesehatan terkendali	100%	100%	-	
				01.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	100%	100%	-	
				01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah	100%	100%	6.426.308.533,00	5.570.749.236,00
				01.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDM di Faskes Pemerintahan	100%	100%	-	
				01.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar di Puskesmas	100%	100%	6.426.308.533,00	5.570.749.236,00
				01.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDM di Faskes Pemerintahan	100%	100%	-	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 5 (2021)			
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2		1	2	3	4	5	6	7
				01.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan terlaksana	100%	100%	9.000.000,00	6.508.020,00
				01.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun	60	60	9.000.000,00	6.508.020,00
				1.02 . 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	PROSENTASE PEMBERIAN REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT	75%	100%	652.987.000,00	208.497.000,00
						PROSENTASE PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG BERSERTIFIKAT P-IRT	75%	100%		
				1.02 . 04 . 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT	JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG DITERBITKAN	20	20	75.489.000,00	43.810.000,00
						Presentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina dan diawasi	25%	61,90%		
				1.02 . 04 . 2.01 . 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG MEMENUHI PERSYARATAN	20	20	75.489.000,00	43.810.000,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 5 (2021)			
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2		1	2	3	4	5	6	7
						JUMLAH APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, U MOT YANG DI BINA DAN DI AWASI	40	130		
				1.02 . 04 . 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	JUMLAH SERTIFIKAT P-IRT YANG DITERBITKAN	120	120	261.325.000,00	124.577.000,00
				1.02 . 04 . 2.03 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya	120	120	261.325.000,00	124.577.000,00
				1.02 . 04 . 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	PROSENTASE PEMERIKSAAN PRODUKSI MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	3%	3%	316.173.000,00	40.110.000,00
				1.02 . 04 . 2.06 . 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi	100%	100%	316.173.000,00	40.110.000,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 5 (2021)			
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2		1	2	3	4	5	6	7
				1.02 . 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	65,03%	83,00%	3.548.870.219,00	2.076.428.799,00
				1.02 . 05 . 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	frekuensi kegiatan tim pokjnal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun	2 kali dalam 1 tahun	1 kali dalam 1tahun	619.840.700,00	240.816.200,00
				1.02 . 05 . 2.01 . 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM	2 MOU/PKS	0	619.840.700,00	240.816.200,00
				1.02 . 05 . 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun	5 Media	5 Media	2.228.068.180,00	1.458.383.531,00
				1.02 . 05 . 2.02 . 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah tema KIE program prioritas yang dipromosikan melalui media	5 Tema	5 Tema	2.228.068.180,00	1.458.383.531,00
						Persentase rumah tangga sehat (10 indikator)	60%	52,57%		
				1.02 . 05 . 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa	100%	100%	700.961.339,00	377.229.068,00
						Cakupan promosi kesehatan tingkat desa	100%	100%		
						Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina	100%	100%		
						Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	87,36%	88,35%		
						Persentase poskesdes purnama mandiri (PURI)	15%	26,22%		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact), Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Tahun ke 5 (2021)			
							Target	Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		2		1	2	3	4	5	6	7
						persentase poskestren purnama mandiri (PURI)	30,43%	46,87%		
						persentase saka Bhakti Husada (SBH) purnama Mandiri (PURI)	14,71%	10,00%		
						persentase desa-kelurahan siaga aktif	15%	15,11%		
				1.02 . 05 . 2.03 . 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	frekuensi bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang dilakukan selama satu tahun	2 kali dalam 1 tahun	2 kali dalam 1 tahun	700.961.339,00	377.229.068,00
						JUMLAH TOTAL			352.452.537.436,52	271.171.511.144,02



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja dan prosentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan Tahun 2021. Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tidak terlepas dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), fungsi perencanaan (Planning) yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD, RKPD maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja hingga pelaksanaan pembangunan kesehatan itu sendiri sebagai fungsi actuating dan kemudian pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi controlling.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Di dalam prosesnya pengukuran dilakukan pada aspek kegiatan, program dan sasaran. Pada prinsipnya pengukuran dilakukan untuk melihat atau mengevaluasi sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan sesuai dengan arah yang diinginkan dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021 yang telah disusun target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan tahun 2021 dituangkan dalam sasaran strategisnya. Dan untuk menyesuaikan target kinerja organisasi Rencana strategis telah mengalami review pada tahun 2017, oleh karena itu capaian kinerja yang akan disampaikan dalam LKJIP adalah capaian kinerja renstra tahun 2021 yang sudah mengalami review.

Untuk mengetahui keberhasilan rencana strategis yang telah dilakukan maka akan dijabarkan keberhasilan capaian kinerja per sasaran dalam renstra.

a. Pencapaian Kinerja

Dalam dokumen renstra terdapat tujuan dan sasaran yang masing – masing memiliki indikator kinerja, yang mendukung visi dan misi Bupati dalam bidang pembangunan kesehatan. Dalam uraian di berikut ini akan disajikan capaian dari tujuan dan sasaran strategis dalam renstra.

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
Meningkatkan Pelayanan Bidang Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu	41,64	138,46	100
	2. Angka Kematian Bayi	6,87	7,16	100

Pada tahun 2021 Angka Kematian Ibu di angka 138,46/100.000 KH dengan jumlah kematian ibu sebesar 29 orang. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang tercatat 83.82/100.000 KH yang berarti ada sebanyak 19 ibu yang meninggal pada masa kehamilan, persalinan, maupun nifas. Kenaikan AKI di Tahun 2021 disebabkan antara lain : a) Kebijakan vaksinasi pada ibu hamil terlambat menyebabkan kematian pada ibu hamil, ibu bersalin, dan nifas sebanyak 57,72%.; b) Pembatasan sosial sehingga pendampingan bumil oleh kader dan nakes tidak terlaksana maksimal; c) Masyarakat enggan ke fasilitas kesehatan; .d) SDM Puskesmas banyak terpapar covid sehingga tidak bisa melakukan pelayanan sesuai standar; e) RS rujukan penuh sehingga kegawatdaruratan tidak bisa terlayani; f) Jumlah bumil covid sangat banyak; g) Mobilisasi masyarakat (suami, orang terdekat) yang tinggi sehingga rentan menularkan ke bumil; h) Banyaknya bayi yang lahir sebelum waktunya (BBLR) dari ibu covid.

Ditindaklanjuti dengan pemantauan dan pelayanan yang berkualitas dengan dokter penanggung jawab KIA dan bidan memantau ibu hamil resiko tinggi dengan ketat dan melakukan rujukan dini terencana, meningkatkan kualitas pemeriksaan

ibu hamil dan pendampingan ibu hamil melalui Candu (Catatan Terpadu), meningkatkan kapasitas SDM bidan dan dokter PJ KIA.

Sedangkan untuk Angka Kematian Bayi pada tahun 2021 tercatat sebesar 7.16/1000 KH atau sebanyak 150 bayi yang meninggal, akan tetapi angka kelahiran hidup turun dari tahun 2020 yaitu 20944. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah kematian sebesar 162 bayi atau 7,1/1000 KH. Kondisi ini ditindaklanjuti dengan peningkatan pemantauan dan peningkatan kualitas pelayanan Countinoum of Care. Pada program 1000 HPK atau 1000 Hari Pertama Kehidupan, dimana pada masa ini selalu dipantau pertumbuhan dan perkembangan bayi sehingga mengurangi resiko kematian. Selain itu pencegahan juga dilakukan pada saat bayi berada dalam kandungan, dengan selalu memantau kondisi kesehatan ibu hamil. Upaya lain yang dilakukan dengan meningkatkan kapasitas SDM bidan dan dokter PJ KIA.

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. IKM	83,86	76,75	91,52
	2. Persentase Keluarga Sehat	100%	100%	100

Hasil capaian kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri disesuaikan dengan indikator Kinerja Utama 2021 disajikan per indikator kinerja sebagai berikut :

1. IKM

Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dalam pelayanan kesehatan IKM dilakukan setiap tahun sekali untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat tentang pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan jaringannya. Selain itu survey kepuasan masyarakat dilakukan dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Nilai IKM atau mutu pelayanan publik tahun 2021 sebesar 76,75 dengan mutu pelayanan B, berarti kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri adalah BAIK. Namun nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 80,19

2. Persentase Keluarga Sehat

Keluarga sehat adalah program Indonesia sehat yang menjadi program prioritas kementerian kesehatan tahun 2016-2019, adalah kegiatan melakukan pendataan kesehatan keluarga per individu. Pada akhir tahun 2021, semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri sudah terdata dalam keluarga sehat (100%). Dan kemudian di ukur indeks keluarga sehat yang di dapat pada keluarga tersebut.

Selanjutnya untuk mendukung program nasional Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga, maka Dinas Kesehatan mengintervensi agar tercapai keluarga sehat sesuai dengan perhitungan indikator keluarga sehat.

Dalam mendukung indikator kinerja IKM dan Persentase Keluarga Sehat ini didukung oleh program kegiatan antara lain :

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Dalam program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat didukung oleh 4 kegiatan yaitu 1). Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, 2) Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, 4) Penerbitan Izin

Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Masing masing kegiatan mempunyai sub kegiatan yang menjabarkan pelaksanaan program kegiatan.

Realisasi indikator kinerja program pada tahun 2021 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	IKM	Persentase Kecamatan STBM	1%	0 %	0%
	Persentase Keluarga Sehat	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	12%	41,57%	346,42%
		Indeks Keluarga Sehat	0,14	0,15	107,14%
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	78,5%	73,3%	93,41%
		Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin	15%	29%	195,27%
		Indeks Keluarga Sehat	0,14	0,15	107,14%
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	78,5%	73,3%	93,41%
		Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin	15%	29%	195,27%

Dari tabel di atas diketahui bahwa Capaian Kinerja Program Pemenuhan UKP dan UKM Tahun 2021 terdapat 3 indikator nilainya mencapai 100%.

Ada beberapa capaian yang mendukung tercapainya target indikator kinerja program diantaranya :

1. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi sampai dengan Tahun 2021 dengan capaian sebesar 41,57%, dengan rincian:
 - a. 37 puskesmas semua sudah terakreditasi. Di Kabupaten Kediri terdapat 3 puskesmas yang dengan tingkat kelulusan paripurna, 18 puskesmas lulus utama, 14 puskesmas lulus madya, dan 2 puskesmas lulus dasar.
Berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.02.02/VI/0855/2020 tentang Pemberitahuan Penangguhan Survei Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama dan Laboratorium maka kegiatan survei akreditasi Puskesmas, Klinik, ditunda pelaksanaannya sampai dengan kasus COVID-19 dapat diatasi.
 - b. 52 klinik pratama, 15 klinik diantaranya sudah mengajukan proses akreditasi pada tahun 2020.
2. Indeks Keluarga Sehat (IKS) tahun 2021 sebesar 0,155 sehingga telah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 0,14. Terdapat peningkatan IKS di Kabupaten Kediri dibandingkan tahun sebelumnya. Kegiatan intervensi lanjut, crosscheck data dengan pemegang program dan update data di aplikasi merupakan faktor yang mendukung peningkatan Indeks Keluarga Sehat.
3. Capaian Tenaga Kesehatan Tradisional (Nakestrad) dan Pengobat/Penyehat Tradisional (Hattra) yang memiliki ijin sampai dengan tahun 2021 sebesar 29,29% melebihi target yang ditentukan sebesar 15% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Persentase Hattra berijin sebesar 29,06%. Jumlah penyehat tradisional ada 1.411 orang dengan rincian 1.347 orang adalah penyehat tradisional dengan metode ketrampilan pijat tradisional Indonesia, 111 orang dengan jenis ketrampilan bekam kering, 19 orang dengan metode ramuan Indonesia, 5 orang dengan ketrampilan olah pikir, 4 orang dengan ketrampilan energi spiritual, 6 orang dengan ketrampilan SPA, 4 orang dengan ketrampilan akupresure, 15 orang pijat refleksi.
- b. Persentase Nakestrad berijin sebesar 83,33%. Jumlah tenaga kesehatan tradisional di wilayah Kabupaten Kediri ada 6 orang. Yang mempunyai SIPTKT ada 2 orang berada di wilayah Puskesmas Kandangan dan Puhjarak dan 3 orang sudah mempunyai izin SIPAT dari wilayah Puskesmas Bendo, Sidorejo, dan Purwoasri, sehingga jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional yang sudah berijin sejumlah 5 orang dari 6 orang Tenaga Kesehatan Tradisional.

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang terakreditasi capaiannya 73,33 %, dengan rincian sebagai berikut : Jumlah RS yang sudah terakreditasi sebanyak 11 RS. RS yang terakreditasi paripurna sebanyak 3 RS yaitu RSUD Kabupaten Kediri, RS Toeloengredjo dan RS Muhammadiyah Siti Khodijah. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 RS yang terakreditasi paripurna masih tetap 3 RS, hal ini disebabkan karena sejak tahun 2019 belum dilaksanakan akreditasi.

Ada satu indikator kinerja program yang masih bernilai 0, dikarenakan untuk menuju kecamatan STBM masih dilakukan proses verifikasi tingkat desa.

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Menyegerakan proses verifikasi tingkat desa

- b. Memaksimalkan pembinaan terpadu, monitoring dan evaluasi terhadap FKTP (puskesmas dan Klinik Pratama)
 - c. Memaksimalkan koordinasi dan kerjasama lintas program terutama dalam penggunaan/pemanfaatan data Keluarga Sehat untuk mendukung kegiatan program dan peningkatan capaian intervensi lanjut
 - d. Melaksanakan Monitoring Evaluasi (Monev) pelaksanaan intervensi lanjut dalam program Keluarga Sehat serta input data hasil intervensi.
4. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yaitu RS, Klinik Utama Rawat Inap dan laboratorium.
 5. Melaksanakan pembinaan sistem pelaporan di rumah sakit
 6. Peningkatan kesiapsiagaan petugas puskesmas dan rumah sakit dalam menghadapi bencana
 7. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini kader dalam menghadapi krisis kesehatan
 8. Memaksimalkan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya izin STPT dan SIPTKT untuk pengobat dan penyehat tradisional (Hattra) yang belum memiliki izin

A. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 9 Sub Kegiatan yaitu : 1) Pembangunan Puskesmas; 2) Pengembangan Puskesmas; 3) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 4) Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 5) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi, 6) Pengadaan Obat, Vaksin; 7) Pengadaan Bahan Habis Pakai; 8) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9) Distribusi alat

Kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya.

Realisasi indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	IKM	Presentase Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	100%	100,00 %
	Persentase Keluarga Sehat	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	100%	100%	100,00 %
		Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	16,7% (7/42)	24% (10/42)	143,71 %
		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Meubelair Puskesmas	100% (100/100)	0%	0,00%
		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Umum Puskesmas	8 paket	8 paket	100,00 %
		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Gigi	7 paket	7 paket	100,00 %

	Puskesmas			
	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas	41 paket	41 paket	100,00 %
	Kecukupan alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	77%	100%	129,87 %
	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi	100 alat	49 alat	49,00%
	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman	76%	72,05%	94,80%
	Jumlah item pengadaan obat , vaksin	50	57	114,00 %
	Jumlah item pengadaan bahan habis pakai	7	12	171,43 %
	Jumlah Puskesmas yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alkes/alat penunjang medik	37 puskesmas	37 puskesmas	100,00 %
	Obat dan alkes yang di distribusikan dalam satu tahun	100%	100%	100,00 %

Capaian indikator kinerja kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatannya dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk capaian persentase penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota tercapai

100 % dimana semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.

2. Untuk indikator sub kegiatan pembangunan puskesmas ada 2 kegiatan pokok yaitu penilaian KJPP dan Rehab/Pembangunan Puskesmas. Penilaian KJPP terlaksana 2 paket untuk FS dan MP RS Type D di Kec. Ngadiluwih, dan 1 paket untuk Jasa konsultasi penilaian bongkaran Puskesmas Ngadiluwih. Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk Rehab/pembangunan Puskesmas terlaksana 8 kegiatan sesuai dengan rencana yaitu Rehab Puskesmas Ngadiluwih, Pustu Cerme, Banyakan, Bogokidul, Gondang, Margourip, Tugurejo dan Rumah Dinas Mukuh. Semua kegiatan dapat terlaksana dengan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

3. Untuk sub kegiatan Pengembangan puskesmas, ada 4 kegiatan pokok yaitu Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung, Jasa Konsultasi FS dan MP RS Type D, Rehab Puskesmas dan Pustu dan revitalisasi Puskesmas.

Jasa Konsultasi perencanaan gedung terlaksana 3 paket yaitu Puskesmas Puhjarak, Grogol, dan Ngadi. Jasa Konsultasi FS dan MP RS Type D terlaksana 1 paket yaitu FS RS Type D Wilayah Korcam Grogol. Kegiatan rehab Puskesmas/Pustu terlaksana 10 lokasi sesuai dengan yang direncanakan yaitu Puskesmas Tarokan, Puskesmas Sidorejo, Puskesmas Blabak, Puskesmas Semen, Pustu Ponggok, Sekaran, Semambung, Pare Lor, Tiru Kidul dan Rumah Dinas Puskesmas Pelas. Dari 10 Lokasi tersebut 8 lokasi dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan dan 2 lokasi yaitu Puskesmas Tarokan terjadi keterlambatan selama 7 (tujuh) hari dan Puskesmas Sidorejo 1 hari keterlambatan.

Kegiatan revitalisasi Puskesmas dilaksanakan di 13 Lokasi yaitu Puskesmas Keling, Puskesmas Pare, Puskesmas Purwoasri, Puskesmas Sidomulyo, Puskesmas Tanon (Papar), Pustu Blimbing, Krenceng, Mangunrejo, Batuaji, Bedug, Plosorejo, Purwodadi, dan

Tengger Kidul. Dari 13 Lokasi tersebut 11 lokasi dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan dan 2 lokasi yaitu Pustu Mangunrejo keterlambatan selama 6 (enam) hari dan Puskesmas Sidomulyo 5 (Lima) hari keterlambatan..

4. Untuk sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana fasyankes ada 5 kegiatan pokok yaitu Konsultasi penilaian bangunan, belanja alat rumah tangga (home use sebanyak 5 paket), Belanja Alat Kesehatan puskesmas (4 paket), Belanja PC/Laptop dan printer (2 paket) dan belanja pemeliharaan gedung Dinkes (2 lokasi). Semua kegiatan dimaksud dapat terselesaikan sesuai target baik dari Jumlah paket maupun waktu pelaksanaannya.
5. Untuk indikator sub kegiatan pengadaan alkes/alat penunjang medik fasyankes terdapat 5 kegiatan pokok yaitu belanja alat kedokteran umum (8 paket), alat kedokteran gigi (7 paket), alat kebidanan (1 paket), alat kesehatan umum (41 paket) dan alat terapi konvalesen (5 paket). Kegiatan pengadaan dimaksud berjumlah 62 paket yang dilaksanakan sesuai yang direncanakan dengan metode e purchasing dan pengadaan langsung. Dari 62 paket tersebut 2 paket terjadi keterlambatan pengiriman barang dari penyedia.

Hambatan dan rencana tindak lanjut yang dilakukan yaitu :

Sehubungan dengan masih ada keterlambatan penyelesaian dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi (Rehab/Pembangunan puskesmas/pustu) maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Tahap perencanaan pembangunan Puskesmas dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan segera dilakukan review pada awal tahun.
- b. Pelaksanaan tender/lelang segera dilaksanakan sehingga dapat memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan
- c. Peningkatan kegiatan monitoring pada saat pelaksanaan kegiatan
- d. Peningkatan kualitas kinerja konsultan pengawasan

6. Untuk sub kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi dengan indikator jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi yaitu terlaksana 49 alat terkalibrasi selama tahun 2021.
7. Untuk sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin terdapat 2 indikator yaitu Persentase obat dengan tingkat aman serta Jumlah item pengadaan obat , vaksin
Capaian indikator pengadanan obat dan perbekalan Kesehatan dengan tingkat aman pada tahun 2021 sebesar 72,05% dari target 80%.
Dalam rangka memberikan jaminan akan persediaan obat dan perbekalan kesehatan maka perlu adanya upaya pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Persediaan obat sesuai kebutuhan adalah jumlah obat yang mampu disediakan pemerintah dibandingkan dengan jumlah obat yang dibutuhkan rakyat dalam pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan pemerintah.
Untuk item obat yang terbeli selama tahun 2021 sebanyak 57 item.
8. Untuk indikator sub kegiatan pengadaan bahan habis pakai terbeli 12 item BHP selama tahun 2021
9. Capaian indikator sub kegiatan pemeliharaan rutin berkala alkes atau alat penunjang medik di fasyankes terealisasi 100 % dimana sebanyak 37 puskesmas telah dilakukan kegiatan pemeliharaan alkesnya
10. Capaian indikator sub kegiatan distribusi alat Kesehatan, obat, vaksin, BMHP ke puskesmas serta faskes lainnya terealisasi 100% dimana pendistribusian Obat, BMHP dan vaksin selama tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama dari sumber anggaran dropping, sedangkan untuk obat dan BMHP untuk pelayanan rutin di fasilitas kesehatan (Puskesmas) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, karena masyarakat sudah berani untuk memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan.

Rencana Tindak Lanjut dari kegiatan pemenuhan ketersediaan dan pendistribusian obat BMHP yang akan dilakukan di tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Persentase Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dengan tingkat aman
 - a. Mengajukan usulan penghapusan obat kadaluwarsa dan rusak kepada Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Kediri agar diterbitkannya surat keputusan Bupati penghapusan obat dan BMHP.
 - b. Meningkatkan keamanan obat dan BMHP dan pencegahan dari gangguan/serangan hewan pengganggu.
 - c. Meningkatkan pengamatan mutu secara fisik dan pemantauan suhu secara berkala.
 - d. Meningkatkan monitoring dan stok opnam secara berkala untuk mencegah terjadinya obat habis karena tidak terpakai.
2. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
 - a. Melakukan penataan obat dan BMHP untuk memudahkan pemantauan.
 - b. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan pengelola program maupun tim pengadaan obat dan BMHP dalam menyusun perencanaan kebutuhan obat dan BMHP sehingga diperoleh kebutuhan obat dan BMHP yang lebih tepat (mencegah terjadinya kekosongan maupun over stock)
3. Persentase kegiatan monitoring obat dan perbekalan kesehatan
 - a. Meningkatkan kualitas monitoring obat dan BMHP
 - b. Meningkatkan pengawasan kepada petugas dalam kegiatan monitoring obat dan BMHP.
 - c. Persentase pelaporan obat dan perbekalan kesehatan puskesmas (LPLPO) yang benar
 - d. Mengevaluasi dan memverifikasi pelaporan obat dan BMHP dari puskesmas secara intensif

- e. Melaksanakan kegiatan validasi data obat dan BMHP secara berkala dengan pengelola obat di puskesmas
- f. Menerapkan system aplikasi e – logistik dalam pengelolaan obat dan BMHP di UPT BPAK
- g. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi petugas pengelola obat dan BMHP melalui pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan obat dan BMHP.

B. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 29 Sub Kegiatan yaitu :

- 1. Pengelolaan Pelayanan Ibu Hamil;
- 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
- 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus
- 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Gangguan Jiwa Berat
- 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
- 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB
- 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan tradisional Lainnya

- 18. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- 20. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 21. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 22. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
- 23. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
- 24. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 25. Operasional Pelayanan Puskesmas
- 26. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 27. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 28. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)
- 29. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Realisasi indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja kegiatan dan subkegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	IKM	Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)	78%	78%	100,00%
	Persentase Keluarga Sehat	Persentase Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal	57%	57%	99,56%

	Utama			
	Persentase tenaga kesehatan tradisional yang dibina	100%	100%	100,00%
	Persentase penyehat tradisional yang dibina	25,0%	29,0%	116,00%
	Persentase desa yang terbentuk Asman TOGA	22,00%	21,0%	95,45%
	Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	100%	100%	100,00%
	Persentase akses sanitasi layak	23%	95,5%	415,13%
	Jumlah tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat	6	6	100,00%
	Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standart (K4)	89%	88%	98,88%
	Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standart	92%	90,45%	98,32%
	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standart (KN2)	94%	93%	98,94%
	Cakupan Balita dilayani sesuai standart	77%	72,50%	94,16%
	Cakupan	55%	96,4%	175,27%

	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standart			
	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	40%	40,00%
	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standart	50%	77,30%	154,60%
	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar	10,70%	26,00%	242,99%
	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar	48,00%	93,00%	193,75%
	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	119%	119,00%
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standart	32%	25,38%	79,31%
	Persentase penemuan dan penanganan kasus TB	43%	39,30%	91,40%
	Persentase keberhasilan pengobatan	96%	33,33%	34,86%

	TB			
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	92%	84,86%	92,54%
	Persentase Orang dengan HIV yang mendapatkan ARV	89%	79%	88,76%
	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	100%	100%	100,00%
	Cakupan Pemberian Vit A	88%	83,33%	94,69%
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,50%	14,10%	90,97%
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	9%	7,19%	79,89%
	Prevalensi anemia pada ibu hamil	26%	14%	53,85%
	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	40 Pos	49 Pos	122,50%
	Persentase jumlah jamaah haji yang diukur kebugaran	80%	48%	60,00%

	jasmaninya			
	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga	37 puskesmas	37 puskesmas	100,00%
	Persentase Tempat Pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar	68,73%	70,00%	101,85%
	Persentase desa ODF	62,30%	77,90%	125,04%
	Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas airnya	78,20%	73,00%	93,35%
	Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis	70,00%	100,00%	142,86%
	Persentase Tempat-tempat umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar	82,50%	85,00%	103,03%
	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina	6	9	150,00%
	Jumlah penyehat tradisional yang dibina	360	410	113,89%
	Jumlah desa yang terbentuk	74	73	98,65%

		Asman TOGA			
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	37 puskesmas	37 puskesmas	100,00%	
	Presentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam	100%	100%	100,00%	
	Persentase penderita HT ditangani sesuai standart	10,7%	26,0%	242,99%	
	Persentase Penderita DM ditangani Sesuai standart	48,0%	93,0%	193,75%	
	Persentase WNI usia 15 - 59 tahun mendapatkan screening sesuai standart	100,0%	40,0%	40,00%	
	Persentase desa yang melaksanakan Posbindu	88,6%	89,8%	101,35%	
	Persentase sekolah yang melaksanakan KTR	44,6%	80,0%	179,37%	
	Persentase Wanita Usia Subur yang melakukan deteksi dini penyakit Kanker payudara dan kanker leher rahim pada usia 30 sd 50	3,2%	2,4%	75,00%	

	tahun			
	Persentase penemuan kusta pada anak	<5%	6,0%	120,00%
	Persentase cacat pada kasus kusta baru	<5%	1,6%	100,00%
	Persentase penderita kusta RFT-MB	95,0%	100,0%	105,26%
	Persentase penderita kusta RFT-PB	100,0%	100,0%	100,00%
	Persentase cakupan tatalaksana pneumonia balita	40,0%	40,0%	100,00%
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana Diare sesuai standart	80,0%	100,0%	125,00%
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan advokasi dan / sosialisasi Pengendalian PISP	60,0%	60,0%	100,00%
	Persentase Puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	65,0%	60,0%	92,31%
	Persentase Kasus Diare pada semua umur ditangani	50,0%	41,2%	82,40%

		sesuai standart			
		Persentase Kasus Diare pada Balita ditangani sesuai standart	40,0%	35,2%	88,00%
		Persentase Bumil dilakukan (DDHB) Deteksi Dini Hepatitis B	70,0%	80,0%	114,29%
		Persentase bayi lahir dari Ibu reaktif HBsAg mendapat HBIg < 24 jam	100,0%	100,0%	100,00%
		Persentase bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg hasilnya Non Reaktif	100,0%	80,0%	80,00%
		Persentase kasus DBD ditangani sesuai standart	100,0%	100,0%	100,00%
		Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)	>=80%	81,0%	101,25%
		Persentase anak usia 1-12 Tahun mendapatkan obat Cacing	100,0%	98,6%	98,60%
		Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan	70%	72%	102,86%

		kesehatan			
		Jumlah masyarakat /tokoh masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan NAPZA	0	0	0,00%
		Jumlah pengadaan urine test	300	500	166,67%
		Presentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa	100%	100%	100,00%
		Jumlah Kecamatan sehat	18 Kec.	26 Kec	144,44%
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan preventif promotif, layanan persalinan	37 puskesmas	37 puskesmas	100,00%
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan operasional fasyankes	37 puskesmas	37 puskesmas	100,00%
		Jumlah Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	21 puskesmas	21 puskesmas	100,00%

	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	341	151	44,28%
	Presentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	92,9%	80,6%	86,76%
	Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak dan Rubella	76,4%	80,7%	105,63%
	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	100,0%	100,0%	100,00%

Dari tabel di atas dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Persentase puskesmas dengan kelulusan akreditasi minimal utama tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 57% dengan penjabaran 3 puskesmas paripurna dan 8 puskesmas utama.
2. Dari target tenaga kesehatan tradisional yang dibina pada tahun 2021 tercapai 100%. Jumlah tenaga kesehatan tradisional di wilayah kabupaten Kediri ada 6 orang. Sampai dengan tahun 2021 yang mempunyai SIPTKT ada 2 orang berada di wilayah Puskesmas Kandangan dan Puhjark dan 3 orang sudah mempunyai izin SIPAT dari wilayah Puskesmas Bendo, Sidorejo, dan Purwoasri, sehingga jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional yang sudah berijin sejumlah 5 orang dari 6 orang Tenaga Kesehatan Tradisional

3. Dari target 25% penyehat tradisional/Hattra yang dibina pada tahun 2021 terealisasi 410 penyehat tradisional/Hattra dari 1411 Hattra yang ada, jadi realisasi dalam persentase 29% sehingga capaian yang didapatkan adalah 116%. Data terakhir tahun 2021 menunjukkan jumlah penyehat tradisional ada 1411 orang dengan rincian 1347 orang adalah penyehat tradisional dengan metode ketrampilan pijat tradisional Indonesia, 11 orang dengan jenis ketrampilan bekam kering, 19 orang dengan metode ramuan Indonesia, 5 orang dengan ketrampilan olah pikir, 4 orang dengan ketrampilan energi spiritual, 6 orang dengan ketrampilan SPA, 4 orang dengan ketrampilan akupresure, 15 orang pijat refleksi
4. Pada tahun 2021 bisa terbentuk 3 desa (Desa Sidomulyo, Desa Sugihwaras, Desa Karangpakis) sehingga jumlah desa keseluruhan yang terbentuk ASMAN TOGA Sejumlah 73 kelompok dari 344 desa yang ada di wilayah Kabupaten Kediri.
5. Puskesmas yang melakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional pada tahun 2021 adalah 37 Puskesmas. Pada tahun 2021 keseluruhan Puskesmas sudah melakukan pembinaan kepada hatra dan tenaga kesehatan tradisional di wilayah kerja maka persentase capaiannya sudah 100%. Target tersebut diatas bisa tercapai dengan pendukung data Tribulan Puskesmas dengan kegiatan validasi data kepada pengelola program Yankes Tradisional Puskesmas.
6. Akses sanitasi layak yaitu JSP (Jamban Sehat Permanen), JSSP (Jamban Sehat Semi Permanen) dan Sharing sdh mencapai 95,5%. Melebihi target dikarenakan ada bantuan sosial STBM
7. Tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat tahun 2021 masih dalam kategori 6 tatanan
8. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
Pengertian pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam standar

pelayanan kebidanan. Antenatal Care (ANC) yang berkualitas sesuai standar yang telah ditentukan oleh Pemerintah yaitu 1 kali dalam trimester I, 1 kali trimester II dan 2 kali trimester III untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dengan pelayanan ANC berkualitas 10 T. Pelayanan antenatal terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil. Setiap kehamilan dalam perkembangannya mempunyai risiko mengalami penyulit dan komplikasi oleh karena itu pelayanan antenatal harus dilakukan secara rutin, terpadu dan sesuai standar pelayanan antenatal yang berkualitas.

Pelayanan antenatal di upayakan agar memenuhi standar kualitas, yaitu :

- 1) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan;
- 2) Pengukuran tekanan darah;
- 3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);
- 4) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
- 5) Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toxoid sesuai status imunisasi;
- 6) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
- 7) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);
- 8) Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk Keluarga Berencana);
- 9) Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya);
- 10) Tatalaksana kasus.

Sedangkan penyebab rendahnya cakupan kunjungan ANC ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas sebagian besar karena kurangnya dukungan keluarga atau pengetahuan masyarakat yang masih rendah. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan peran bidan dan dukungan suami, keluarga dan masyarakat agar ibu hamil

dapat melaksanakan kunjungan ANC dengan lengkap. Cakupan yang telah dicapai 88 %, turun 3,48 % bila dibandingkan tahun lalu, hal ini disebabkan karena :

- 1) Ibu hamil enggan atau takut ke puskesmas (FKTP) karena takut tertular
- 2) Adanya anjuran menunda pemeriksaan kehamilan dari POGI dan kelas ibu hamil
- 3) Masyarakat datang untuk memeriksakan kehamilannya diusia kandungan lebih dari 12 minggu.
- 4) Ketidaksiapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana termasuk alat pelindung diri
- 5) Kesehatan Mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga sulit untuk dipantau

Untuk mengantisipasi perburukan layanan ibu hamil di masa pandemi COVID-19 maka dilakukan upaya tindak lanjut:

- 1) Melaksanakan Monitoring pelayanan di era pandemi sesuai standart
- 2) Membuat panduan pelayanan baik untuk ibu hamil bukan COVID-19, maupun ibu hamil yang dicurigai terinfeksi COVID-19 (kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG), atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP)) maupun yang sudah konfirmasi menderita infeksi COVID-19.
- 3) Membahas alur tatalaksana layanan maternal, beberapa hal perlu dipertimbangkan di masa pandemi oleh layanan kesehatan
- 4) Mengaktifkan Posyandu dengan protokol kesehatan
- 5) Meningkatkan Kepedulian masyarakat melalui program Peduli Keluarga
- 6) Mengaktifkan Desa P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi).
- 7) Swiping Ibu hamil oleh petugas ditingkatkan dengan Protokol kesehatan
- 8) Meningkatkan jejaring dengan Fankes di wilayah kerja Puskesmas

9) Meningkatkan peran dr Pj KIA

9. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Fasilitas Kesehatan adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan. Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standart. Capaian Kegiatan sebesar 90,45% .

Sebanyak 3 ibu bersalin di dukun dan 11 org tidak bersalin difaskes namun tetap ditolong nakes.

Untuk mengantisipasi perburukan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di masa pandemi dilakukan upaya antara lain :

1. Menyiapkan APD sesuai standart
 2. Sosialisasi tentang pelayanan Persalinan di era Pandemi
 3. Membuka Persalinan di Puskesmas
 4. Meningkatkan Jejaring Fasilitas kesehatan diwilayah kerja Puskesmas dan menyiapkan saptas
 5. Mekasanakan skrening covid sesuai panduan sehingga tidak terjadi penumpukan px di RS
 6. Melaksanakan Kemitran Bidan dan Dukun
 7. Meningkatkan peran dr Pj KIA
10. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari

persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar.

Capaian saat ini 93,%, belum sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini disebabkan:

- 1) Masyarakat enggan membawa bayinya ke fasyankes
- 2) Ketidaksiapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana termasuk pelindung diri
- 3) Adanya bayi yang meninggal pada usia 0-28 hari yaitu sebanyak 162 bayi

Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kondisi di atas antara lain :

- 1) Mengunjungi bayi melalui daring dengan keluarga
- 2) Sosialisasi melalui berbagai media
- 3) Sweping pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat tentang kesehatan Bayi Baru Lahir sehingga dimanapun berada untuk memeriksakan bayinya.

11. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Pelayanan kesehatan, meliputi : a) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun b) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun. c) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

Capaian saat ini 72,52%

Hal ini disebabkan antara lain :

- 1) Kurangnya jam buka posyandu atau posyandu belum berfungsi sebagaimana mestinya, didukung dari Surat Edaran Bupati yang menghentikan operasional Posyandu di era pandemi.

2) Masyarakat enggan ke Posyandu

3) Kurangnya Sarana dan Prasarana terutama APD bagi petugas

Untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan Balita dilakukan upaya antara lain :

1. Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Balita

2. Koordinasi dengan Tim Gugus Covid dalam penyelenggaraan Posyandu

3. Bekerja sama dengan promkes dalam menyusun juknis Pelayanan Posyandu berikut payung hukumnya

4. Kunjungan rumah pada balita yang berisiko

5. Meningkatkan Kerjasama dengan Guru TK dan PAUD dalam pemantauan

6. Melatih guru TK dan PAUD dalam pelaksanaan SDIDTK

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ke Posyandu

8. Monitoring evaluasi kegiatan posyandu sesuai SE Bupati

12. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjarangan kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota tersebut pada waktu kelas 1 dan kelas 12. Standar pelayanan penjarangan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi : a) Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia); b) Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas); c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut; d) Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen; e) Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala;

Untuk pencapaian Skrening Pelayanan Usia Pendidikan dasar didapatkan 96,4 %

Upaya yang dilakukan untuk tetap meningkatkan capaian indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar yaitu :

1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kemenag dan lintas sektor

2. Skrening dilakukan melalui Aplikasi
3. Mempersilahkan anak yang tidak masuk ketika diskrening untuk dilayani di Puskesmas, Posyandu dengan metode daring

13. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Persentase WNI usia Produktif (15 s/d 59 tahun) mendapat screening sesuai standart masih belum mencapai target hasil capaian masih 40% dari target 100% yang ditetapkan. Hal ini di karenakan kemauan dan pengetahuan masyarakat untuk menscreening kesehatanya masih sangat rendah, Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana untuk deteksi dini penyakit tidak menular di Posbindu belum maksimal sehingga belum bisa mencapai seluruh target yang ada. Selain itu karena masa pandemi covid-19 sehingga masyarakat yang datang ke Posbindu belum maksimal serta sarana prasarana bahan habis pakai belum mencukupi untuk kegiatan Posbindu di masing masing wilayah dan dana desa belum maksimal untuk pembelian Gula Darah.

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi di atas yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya deteksi dini untuk melakukan screening usia 15 s/d 59 tahun

14. Usia Lanjut Yang Mendapat Skrening

Pelayanan skrening kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah : a) Dilakukan sesuai kewenangan oleh : (1) Dokter; (2) Bidan; (3) Perawat; (4) Nutrisionis/Tenaga Gizi; (5) Kader Posyandu lansia/Posbindu b) Pelayanan skrening kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah. c) Pelayanan skrening kesehatan minimal dilakukan sekali setahun. d) Lingkup skrening adalah sebagai berikut : (1) Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah. (2) Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah. (3) Deteksi kadar kolesterol dalam darah (4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan

menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS).

Saat ini capaian belum memenuhi target yang diharapkan yaitu sebanyak 77,30% . Hal ini disebabkan oleh pembatasan mobilitas lansia

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator di atas antara lain :

- a. Meningkatkan Kerjasama dengan BPMPD dan Bapeda untuk sosialisasi dana Desa peruntukan Posyandu Lansia
- b. Sosialisasi Kesehatan Usia Lanjut sesuai SE Bupati
- c. Kunjungan rumah dengan protokol kesehatan

15. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Persentase penderita Hipertensi yang ditangani sesuai standart masih 26 % dari target 100% dengan jumlah penderita HT sebanyak 116.163 Orang yang dilayani sesuai standart dengan target sejumlah 447.461 penduduk usia diatas 15 tahun. Hal ini juga disebabkan kurangnya pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin ke Posbindu selain itu walaupun sdh terdeteksi kalau Tekanan Darah tinggi tidak mau datang ke tempat pelayanan kesehatan karena merasa tidak ada keluhan dan merasa sehat sehat saja.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator di atas antara lain :

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Penyakit Tidak Menular khususnya Hipertensi
2. Advokasi kepada desa supaya bisa membantu dalam pengembangan posbindu dan ikut memfasilitasi sarana prasarana kegiatan Posbindu dan bisa menggerakkan masyarakat untuk deteksi dini Penyakit tidak Menular
3. Refresing kader Posbindu yang sudah ataupun belum terbentuk .

16. Pelayanan kesehatan penderita DM

Persentase penderita DM yang dilayani sesuai standart capaian 93% dari target 100%, dengan jumlah penderita DM sebanyak 30.533 orang yang dilayani sesuai standart dengan target sejumlah 30.154 orang. Hal ini disebabkan masyarakat sudah mulai memahami tentang penyakit Diabetes Melitus dan masyarakat sudah melakukan deteksi dini penyakit PTM (DM) dengan datang ke Posbindu yang ada di wilayahnya masing masing, selain itu juga untuk sarana dan prasarana untuk deteksi dini penyakit tidak menular sudah banyak yg memfasilitasi baik dari dana desa ataupun dari pemerintah. Posbindu yg sudah terbentuk sampai dengan tahun 2021 sebanyak 309 Posbindu.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator di atas antara lain :

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Penyakit Tidak Menular khususnya DM
 2. Advokasi kepada desa supaya bisa membantu dalam pengembangan posbindu dan ikut memfasilitasi sarana prasarana kegiatan Posbindu dan bisa menggerakkan masyarakat untuk deteksi dini Penyakit tidak Menular sesuai standart terutama untuk bahan habis pakai berupa Gula Darah.
 3. Refresing kader Posbindu yang sudah ataupun belum terbentuk .
17. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

ODGJ berat yang ditangani sesuai standart sudah mencapai target 100 % dari kasus ODGJ berat sejumlah 3.578 orang dan ditangani sesuai standart sejumlah 3.578 orang. Di Kabupaten Kediri masih ada ODGJ berat yang di pasung sejumlah 28 Orang untuk bebas pasung tahun 2019 masih belum bisa tercapai karena ada beberapa kendala masih tingginya stigmanya masyarakat tentang ODGJ dan pembebasan pasung berbasis masyarakat masih belum bisa dilaksanakan karena keluarga dan masyarakat sekitar masih belum bisa menghilangkan stigma ODGJ. Untuk ODGJ berat yang sudah membaik di fasilitasi dengan pembentukan Posyandu Jiwa supaya

ODGJ bisa mandiri dan produktif (Jumlah Posyandu Jiwa yang ada di Kabupaten Kediri sejumlah 37 Posyandu yg tersebar di 37 Puskesmas di wilayah Kabupaten Kediri).

Langkah langkah tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pencapaian indikator ini antara lain :

- 1) Mengoptimalkan TPKJM (Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat) di tingkat Kabupaten
 - 2) Sosialisasi tentang program jiwa dan bebas pasung kepada lintas sektor tingkat kecamatan dan tingkat desa.
 - 3) Sosialisasi tentang program jiwa kepada keluarga penderita supaya bisa memahami pentingnya pengobatan rutin kepada penderita ODGJ dan cara membersihkan dan merawat diri pada penderita.
 - 4) Penggunaan dana desa untuk memfasilitasi pembiayaan rujukan dan bantuan permakanan pada penderita ODGJ berat.
18. Capaian kinerja program TB untuk penemuan dan penanganan kasus TB sebesar 39,30%. Untuk meningkatkan capaian ini dengan melakukan penyisiran data pada rumah sakit dan klinik serta upaya yang lebih intensif di Puskesmas. Selain itu meningkatkan Advokasi kepada pelayanan kesehatan swasta, terutama Dokter Praktek Swasta untuk turut berpartisipasi dalam pelaporan atas penyakit menular yang dilayani, utamanya untuk penyakit TB kepada Puskesmas setempat untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan.
19. Indikator orang beresiko yang mendapat pemeriksaan HIV mencapai 84,86 %, hal ini dilakukan dengan memperbanyak layanan tes HIV, sedangkan indikator Penderita HIV yang mengakses layanan CST mencapai sebesar 85,28 %. Untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut dengan menambah layanan CST dan konseling terhadap ODHA untuk akses layanan CST serta layanan pengobatan ARV.
20. Pelayanan kesehatan gizi masyarakat
- Bulan februari dan agustus adalah bulan vitamin A. Di kedua bulan ini anak bisa mendapatkan suplementasi vitamin A kapsul biru (dosis

100.000IU) untuk bayi umur 6-11 bulan dan kapsul merah (dosis 200.000 IU) untuk anak umur 12-59 bulan.

Manfaat pemberian vit A untuk anak :

Vitamin A/retinol terlibat dalam pembentukan, produksi, dan pembentukan sel darah merah, sel limfosit, antibodi juga integritas sel epitel pelapis tubuh. Adapun vit A juga bisa mencegah rabun senja, xeroftalmia, kerusakan kornea dan kebutaan serta mencegah anemia pada ibu nifas. Jika anak kekurangan vit A maka anak bisa rentan terserang penyakit infeksi seperti infeksi saluran pernapasan atas, campak dan diare, Capaian vit A usia 6-11 bulan 83 %, sedangkan usia 12-59 bulan sebanyak 84%.

Prevalensi Stunting

Dari 77.701 balita yang ditimbang terdapat terdapat balita stunting sebanyak 14,10%. Sedangkan balitas dengan kategori wasting sebanyak 14,10%. Wasting adalah kondisi ketika berat badan anak menurun, sangat kurang atau bahkan berada di bawah rentang normal. Anak yang mengalami kondisi ini umumnya memiliki proporsi tubuh yang kurang ideal. Anemia disebabkan oleh tubuh yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pasokan darah, zat besi dan asam folat yang lebih banyak dari biasanya semasa kehamilan, sedangkan kasus anemia ibu hamil sebanyak 14,19%

21. Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga

Jumlah Pos UKK yang terbentuk adalah jumlah kegiatan pembentukan pos usaha kesehatan kerja puskesmas yang ada dikelompok masyarakat pekerja. Target sasaran kinerja adalah sebesar 30 Puskemas sudah membentuk Posk UKK dengan capaian kinerja sebesar 49 pos UKK di 30 Puskesmas dimana semua Pos UKK tersebut semua sudah terlegalisasi / sudah ada SK nya .

Capaian indikator jamah haji yang diukur kebugarannya tahun 2021 sebesar 48%, dibawah target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan

keberangkatan jamaah haji di masa pandemi ditunda sehingga pengukuran kebugaran hanya pada jamaah yang terbatas.

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olah raga adalah jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga seperti tes kebugaran haji, posbindu maupun tes kebugaran di instansi yang terkait. Target sasaran kinerja adalah 37 Puskesmas dan capaian kinerja adalah bahwa semua puskesmas (37) sudah melaksanakan kesehatan olah raga secara rutin, minimal 2 (dua) kali tes kebugaran haji yaitu haji yang akan berangkat tahun bersangkutan dan tes kebugaran haji untuk tahun depan. Dan sudah semua puskesmas yang melaksanakan tes kebugaran di posbindu, lingkungan puskesmas dan siswa-siswa sekolah baik tingkat sekolah dasar maupun tingkat SLTP. Untuk tahun 2021 ini karena masa pandemi untuk upaya kesehatan olah raga dibatasi hanya utk kebugaran haji dan karyawan Puskesmas, hal ini pun dengan penerapan protokol kesehatan di setiap pelaksanaannya.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan layanan di atas dengan cara :

- 1)Advokasi kepada lintas sektor dan program serta desa dalam membantu pengembangan kesehatan kerja dan olah raga yang ada di wilayah.
 - 2)Pengadaan sarana prasarana peralatan pemeriksaan kesehatan kerja baik di lingkungan puskesmas maupun di luar puskesmas yaitu Pos UKK dan untuk kesehatan olah raga (tes kebugaran kit).
 - 3)Meningkatkan SDM petugas Puskesmas (pengelola kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga).
22. Pelayanan kesehatan lingkungan

Presentase TPM yang memenuhi syarat di Kabupaten Kediri dengan target yang memenuhi syarat 70% dari jumlah TPM yang ada di Kabupaten Kediri sebesar 3.918. Dari jumlah TPM tersebut dilakukan inspeksi sanitasi, sosialisasi dan penyuluhan hygiene

sanitasi dengan total capaian sasaran kinerja 2.742 TPM (70%). Meskipun sudah banyak TPM yang memenuhi syarat, masih diperlukan sosialisasi untuk pengurusan sertifikat laik sehatnya.

Persentase desa ODF (Open defecation free) adalah desa yang seluruh masyarakatnya sudah mengakses buang air besarnya ke jamban sehat. Target sasaran adalah 65% dari 344 desa yaitu sebesar 206 desa dan capaian kinerja adalah sudah 268 desa (77.9%) yang dideklarasikan oleh bupati sebagai desa ODF

Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas airnya realisasi capaian kinerja sebesar 73% dari target yang ditetapkan sebesar 78,20%. Kondisi ini disebabkan di masa pandemi berkurang kegiatan IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) dan pemeriksaan kualitas air.

Persentase Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sudah 100%. Semua fasyankes (puskesmas, rs, klinik) sudah melaksanakan MOU dengan pihak ke-3 baik limbah padat maupun limbah cair (bagi yang belum memiliki IPAL).

Persentase TTU yang memenuhi syarat memiliki sertifikat laik sehat dengan sasaran kinerja TTU yang diperiksa adalah sarana pendidikan (SD, SLTP, SLTA), sarana kesehatan (Puskesmas, RSUD) dan hotel (Bintang dan non bintang) sebesar 1.360 dengan target sasaran kinerja sebesar 84%. Dari jumlah TTU yang ada sebanyak 1.122 TTU memenuhi syarat, dengan hasil capaian kinerja 85% yaitu banyaknya sekolah yang sudah memenuhi syarat .

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian indikator layanan kesehatan lingkungan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sosialisasi, advokasi, penyusunan regulasi dan koordinasi antar lintas sektor program STBM (Sanitasi Total berbasis Masyarakat) untuk meningkatkan sanitasi di masyarakat
- 2) Advokasi kepada pemangku kebijakan dan camat tentang pelaksanaan kabupaten sehat.

- 3) Peningkatan pelatihan wira usaha sanitasi (Wusan) di lingkungan masyarakat untuk menambah desa yang ODF.
- 4) Meningkatkan SDM petugas Puskesmas (pengelola kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga).

23. Pengelolaan surveilans kesehatan

Kegiatan surveilans yang dilakukan meliputi penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa) secepat mungkin atau kurang dari 24 jam. Penanggulangan tersebut bisa terdiri dari beberapa kegiatan yaitu penyelidikan epidemiologi, pengambilan sampel, dan pengiriman sampel. Selain itu juga ada kunjungan Rumah sakit (S A R S) untuk mendeteksi secara dini kasus KLB yang ada di RS. Kegiatan surveilans juga melaporkan penyakit potensial KLB secara tepat dan tepat. Kemudian juga menerapkan SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Response) rutin setiap minggunya. Mulai dari minggu 1 sampai dengan minggu 52 atau 53 setiap tahun. KLB yang diwaspadai di seksi surveilans dan imunisasi utamanya adalah penyakit-penyakit PD3I (Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) seperti Campak, AFP, Rubella, dan lain sebagainya. Pada tahun 2020 dan 2021 pandemi Covid-19 juga termasuk kejadian KLB.

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk penanggulangan KLB adalah :

- a. Dinas kesehatan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk mengkoordinir kegiatan dalam rangka menangani kasus di masing masing wilayah kerja puskesmas.
- b. Koordinasi antara TRC dengan Puskesmas, Lintas Program terkait serta lintas sektor Untuk memutus rantai penularan Covid-19 dalam hal mengkampanyekan 3 M (Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak)
- c. Bersama dengan pihak pihak terkait, dilaksanakan tracing, testing dan treatment (3T) apabila terjadi kasus di wilayah tersebut dengan didanai dari APBD dan Biaya Tak Terduga (BTT)

- d. Melakukan pengiriman specimen ke BBLK Surabaya dengan dana APBD II
 - e. Melakukan pertemuan dengan petugas surveilans puskesmas dan lintas program untuk mengintensifkan sosialisasi tentang Covid-19 dan penanganannya, mengingat kasus ini adalah kasus baru dengan pendanaan dari APBD
 - f. Melakukan pertemuan dengan kontak person RS (5RS) 1 x setahun, dengan dana APBD II.
 - g. Melaksanakan kunjungan Rumah sakit (S A R S) untuk mendeteksi secara dini kasus KLB yang ada di RS dengan dana APBD II.
 - h. Melakukan Bimbingan dan Teknis Pada saat terjadi kasus KLB dengan dana APBD II
 - i. Memberikan rekomendasi dari hasil pengamatan yang dilakukan.
24. Layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- a. Persentase Desa dengan posbindu sudah mencapai target yaitu 89% dari target 88,6% Jumlah desa yang sudah mempunyai posbindu 309 desa dari 344 desa yang ada, hal ini dikarenakan salah satunya adalah keaktifan dari pihak desa untuk mendukung kegiatan Posbindu dan ketersediaan Posbindu Kit sudah tercukupi oleh dana dari Pusat yang belum tercukupi untuk screening sesuai standart adalah bahan habis pakai sesuai jumlah sasaran usia produktif (15 s/d 59 tahun).
 - b. Persentase sekolah yang melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok cakupan sudah 80% dari target 44,6%.
Upaya sosialisasi tentang KTR kepada guru sekolah di Kabupaten Kediri untuk komitmen membentuk Kawasan Tanpa Rokok tetap terus dilakukan.
 - c. Presentase perempuan usia 30 s/d 50 tahun yang terdeteksi kanker leher rahim dan kanker payudara masih belum mencapai target (2,4%) dari target 3,2%. Hal ini dikarenakan sosialisasi

tentang Kanker leher rahim dan kanker payudara masih kurang, selain itu adanya budaya malu untuk periksa IVA dan SADANIS. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut dilakukan kegiatan sosialisai tentang Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara kepada masyarakat secara kontinyu.

d. Untuk pencegahan dan pengendalian kusta. dari empat indikator kinerja, tiga diantaranya mempunyai capaian kinerja mencapai target, yaitu pada indikator penemuan kusta pada anak sebesar 100%, RFT MB sebesar 100% dan RFT PB sebesar 100%. Sedangkan untuk indikator cacat pada kasus kusta baru ditargetkan < 5%, tetapi ditemukan kasus cacat sebesar 1,6%. Hal ini terjadi karena keterlambatan sebagai akibat masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kusta disamping faktor malu pada keluarga untuk mengakui adanya anggota keluarga yang menderita penyakit kusta, masih ada kusta yang disembunyikan dan ditemukan dalam keadaan sudah terlambat.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kondisi di atas anatar lain dengan Peningkatan informasi tentang penyakit kusta, baik melalui media cetak ataupun elektronik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit kusta, sehingga diharapkan penemuan kasus kusta baru tidak terlambat untuk menghindari terjadinya kecacatan, termasuk pada kader, guru UKS dan petugas kesehatan.

e. Pencegahan dan pengendalian Diare, capaian kinerja program diare untuk kasus diare pada semua umur tercapai 41,2 %, sedangkan untuk penemuan kasus diare pada balita 35,2 %. Kedua indikator tersebut belum bisa tercapai dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh semakin pahamnya masyarakat tentang penyakit diare, sehingga beberapa kasus dilakukan pengobatan secara mandiri. Disamping itu, untuk kasus-kasus diare pada balita sebagian besar dibawa kepada pelayanan dokter praktek

swasta dan dapat dikatakan bahwa semua dokter praktek swasta tidak memberikan laporan.

f. Program hepatitis dengan indikator pemeriksaan HBSAg mencapai kinerja cukup baik yaitu 80%, hal ini karena dukungan terhadap pemeriksaan hepatitis sudah tersedia dengan baik reagen maupun pelayanan ANC untuk pemeriksaan Hepatitis bagi ibu hamil di Puskesmas sudah berjalan dengan baik. Namun masih perlu ditingkatkan lagi agar mencapai kinerja yang maksimal dengan cara Peningkatan ketersediaan reagen untuk pemeriksaan HbsAg pada ibu hamil sebagai deteksi atas penyakit Hepatitis dan koordinasi dengan lintas program untuk peningkatan capaian kinerja tersebut dan peningkatan jejaring layanan dengan fasyankes yang lain .

g. Pada program P2 DBD didapatkan indikator kinerja pada setiap kasus DBD telah ditangani sesuai standard sebesar 100% sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan Indikator Angka Bebas Jentik mencapai 81 %. Hal ini perlu ditingkatkan sebagai upaya pencegahan demam berdarah dengan mengefektifkan kegiatan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J).

Dari hasil analisa di atas upaya yang dilakukan yaitu Peningkatan informasi tentang penyakit DBD dengan utamanya kegiatan PSN dengan pendekatan gerakan 1 rumah 1 jumantik (G1R1J) sebagai upaya untuk peningkatan angka bebas jentik dengan tujuan untuk mencegah demam berdarah. Dan peningkatan penyediaan logistik survailans DBD agar dapat segera ditangani sehingga menurunkan resiko timbulnya kematian.

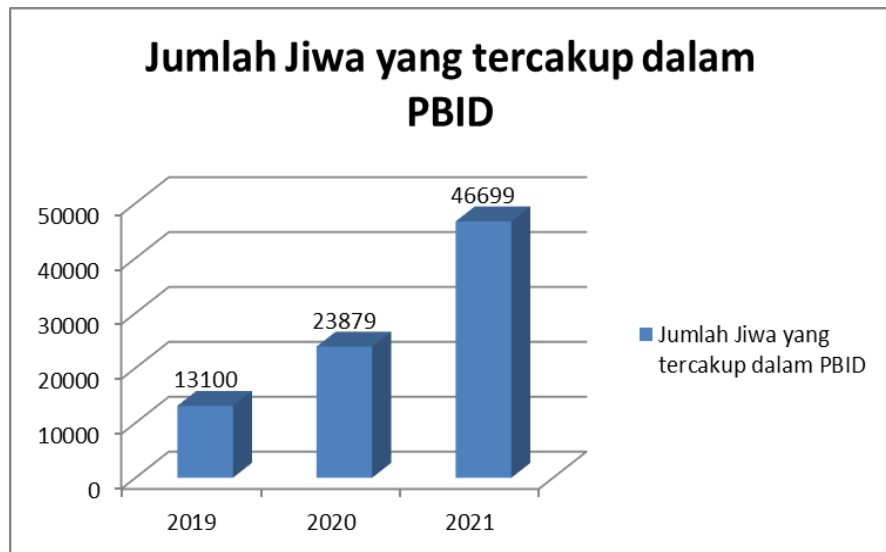
h. P2 Kecacangan. Hampir semua anak usia 1 – 12 tahun telah diberi obat cacing, yakni 98,6 %.

25. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat

a. Tercakupnya penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan. Evaluasi dari target dan realisasi tahun 2021 jumlah penduduk yang menerima bantuan adanya kenaikan dari target

23.879 jiwa menjadi 46.699 jiwa. Hal ini terjadi karena adanya kondisi penambahan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) baru yang diusulkan terwadahi dalam pembiayaan kesehatan dari Pemerintah Propinsi menjadi terwadahi dalam pembiayaan kesehatan Kabupaten

Diagram 1. Jumlah penduduk yang tercakup dalam pembiayaan kesehatan daerah dari tahun 2019, 2020 dan 2021.



Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2019, 2020 dan 2021

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa semakin banyaknya masyarakat yang terbiayai kesehatannya oleh Jaminan Kesehatan Nasional.

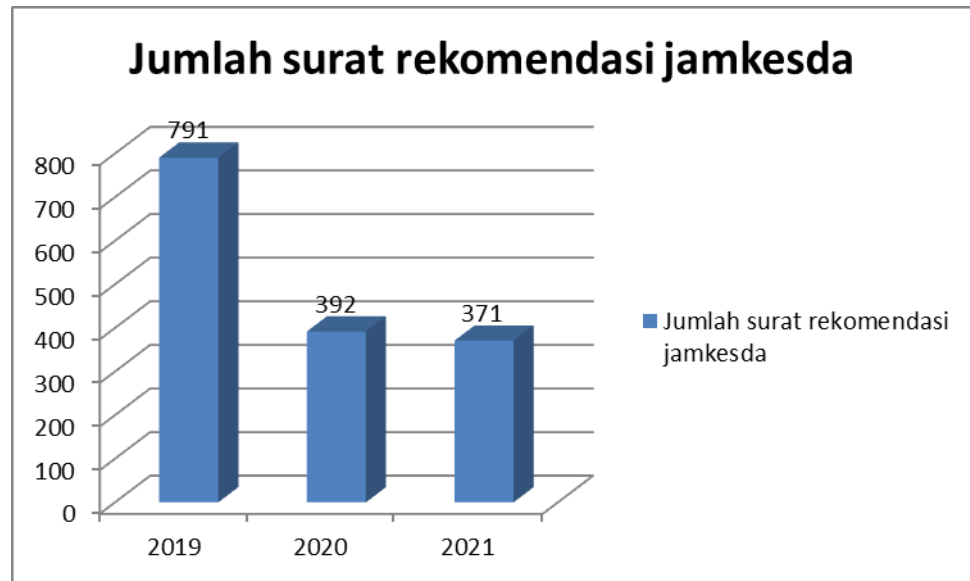
- b. Terbayarnya tagihan klaim pembayaran pelayanan kesehatan bagi peserta pembiayaan kesehatan masyarakat miskin sesuai hasil verifikasi

Sebanyak 12 pembayaran yang sudah terbayarkan yang terperinci dalam 12 bulan (1 bulan 1 kali pembayaran). Pembayaran iuran BPJS untuk masyarakat miskin di wilayah kabupten Kediri dapat terbayarkan rutin setiap bulan sesuai pengajuan. Hal ini juga dapat terlaksana oleh karena anggaran untuk iuran BPJS telah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Mulai tahun

2019 sampai dengan 2021 pembayaran tagihan klaim selalu tepat waktu dan terbayarkan.

- c. Terbitnya rekomendasi bagi pemohon pembayaran jamkesda
 Sebanyak 371 surat rekomendasi bagi pemohon pembayaran jamkesda yang diterbitkan dalam kurun waktu tahun 2021. Terjadi peningkatan 6% dari target.

Diagram 2. Surat rekomendasi bagi pemohon pembayaran jamkesda tahun 2019, 2020 dan 2021.



Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2019, 2020 dan 2021

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan permintaan pembiayaan kesehatan oleh daerah. Hal ini menunjukkan bahwa warga Kabupaten Kediri sudah banyak yang masuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

- 26. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Masyarakat /tokoh masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan NAPZA belum dapat dilakukan karena kondisi pandemi covid-19. Sedangkan untuk tes urin yang sudah dilakukan tahun 2021 sebanyak 500 orang
- 27. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

Pengambilan dan pengiriman specimen \leq 24jam ke laboratorium pemeriksa dengan target 100% dan realisasi 24 kali atau sebesar 100%.

28. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Jumlah kecamatan yang adopsi Kecamatan sehat adalah dengan target sasaran sejumlah 26 kecamatan dan tahun 2021 Kabupaten sehat mengambil 6 tatanan yaitu Sarana prasarana pemukiman sehat, Hutan sehat, pariwisata sehat dan kehidupan masyarakat sehat mandiri. Dan Kecamatan sebagai titik pantau dan teradopsi adalah 26 kecamatan.

29. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sampai dengan tahun 2021 sudah mencapai target yaitu sebesar 100%. Sedangkan Puskesmas dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama sebanyak 21 puskesmas dengan status akreditasi 3 paripurna dan 18 utama, Tidak terdapat penambahan presentase Puskesmas dengan kelulusan akreditasi Paripurna di tahun 2021 karena survey akreditasi tidak dilaksanakan selama Pandemi Covid-19

30. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Capaian indikator Presentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu sejumlah 19.152 bayi dari 23.756 sasaran atau sebesar 80,6%. Kemudian untuk indikator Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak dan Rubella sebanyak 19.150 anak dari 23.919 sasaran atau sebesar 80,07%.

31. Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah

Indikator Presentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah dengan target 100% dan terealisasi 52 laporan atau sebesar 100% yaitu laporan pada minggu 1 sampai 52 terlaksana semua.

C. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi terdiri atas 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	IKM	Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan	37 puskesmas	37 puskesmas	100,00%
	Persentase Keluarga Sehat	Jumlah dokumen informasi yang disusun	38 dokumen	38 dokumen	100,00%
		Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	2 jaringan 37 pkm	2 jaringan 37 pkm	100,00%

D. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah

Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah terdiri atas 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
2. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2021 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	IKM	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100%	100%	100,00%
	Persentase Keluarga Sehat	Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik ($\geq 89\%$)	5,4%	2,7%	50,05%
		Persentase keluarga yang mendapat intervensi	5,5%	5,9%	107,27%
		Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi	0%	0%	0,00%
		Persentase RS yang terakreditasi paripurna	21,43%	27,27%	127,25%
		Persentase Klinik Utama yang terakreditasi	0%	0%	0,00%
		Persentase lab Madya yang terakreditasi	0%	0%	0,00%
		Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik ($\geq 89\%$)	2 puskesmas	1 puskesmas	50,00%
		Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS	22.402 keluarga	23209 keluarga	103,60%

		Jumlah Klinik Pratama yg Terakreditasi	0 klinik	0	0,00%
		Jumlah RS yang terakreditasi paripurna	3	3	100,00%
		Jumlah Klinik Utama yang terakreditasi	0	0	0,00%
		Jumlah lab Madya yang terakreditasi	0	0	0,00%

Dari tabel di atas dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan izinnya sebesar 100%
2. Presentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik
Presentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik sebesar 2,7 % yaitu hanya 1 puskesmas kinerja baik (puskesmas gampengrejo). Sedangkan 24 puskesmas kinerja cukup, puskesmas kinerja kurang 12 puskesmas (kras, wates, ngancar, puncu, keling, bendo, sidorejo, pare, kunjang, puhjarak, tiron, tarokan). Target belum tercapai sesuai dengan yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena selama Pandemi Covid-19 kegiatan program belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
3. Persentase keluarga yang mendapat intervensi
Target presentase keluarga yang mendapatkan intervensi sudah tercapai yaitu sebesar 5,9 %.
4. Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi
Presentase Klinik Pratama yang terakreditasi sebesar 0 %. Kegiatan survey akreditasi tidak dilaksanakan selama Pandemi Covid-19 sehingga tidak ada klinik yang melaksanakan akreditasi pada tahun 2021 dan dengan diterbitkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.01/MENKES/455/2020 tentang masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) maka Klinik yang belum dilakukan

akreditasi membuat pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan dicabut oleh pemerintah

5. Persentase RS yang terakreditasi paripurna

Persentase RS yang terakreditasi paripurna sesuai standart capaian sudah melebihi target 127,25% dari target 100 % dengan jumlah RS yang sudah terakreditasi sebanyak 11 RS. RS yang terakreditasi paripurna sebanyak 3 RS yaitu RSUD Kabupaten Kediri, RS Toeloengredjo dan RS Muhammadiyah Siti Khodijah. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 RS yang terakreditasi paripurna masih tetap 3 RS, hal ini disebabkan karena sejak tahun 2019 belum dilaksanakan akreditasi. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.01.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID – 19)., untuk rumah sakit yang masa berlaku akreditasinya berakhir baik sebelum maupun sesudah Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah , maka sertifikat akreditasinya masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID 19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah

6. Persentase Klinik Utama yang terakreditasi

Indikator kinerja persentase klinik utama yang terakreditasi di tahun 2021 targetnya masih 0, karena akreditasi klinik direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan tahun 2026

7. Persentase lab Madya yang terakreditasi

Indikator kinerja persentase laboratorium madya yang terakreditasi di tahun 2021 targetnya masih 0, karena akreditasi klinik direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026

8. Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik ($\geq 89\%$)
Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik ($\geq 89\%$) hanya 1 puskesmas yaitu puskesmas gampengrejo.
9. Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS
Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS pada tahun 2021 sebanyak 23209 keluarga melebihi target yang ditetapkan yaitu 22402 keluarga.

2) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia didukung oleh 3 kegiatan yaitu 1). Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten/kota, 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Masing masing kegiatan mempunyai sub kegiatan yang menjabarkan pelaksanaan program kegiatan.

Realisasi indikator kinerja program pada tahun 2021 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	IKM	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	70%	70%	100,00%

A. Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota

Kegiatan Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota terdiri atas 2 Sub Kegiatan yaitu : 1) Pengendalian perizinan praktik tenaga

kesehatan; dan 2) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Realisasi indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	IKM	Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan	100%	100%	100,00%
		Perizinan praktek tenaga kesehatan terkendali	100%	100%	100,00%
		Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	100%	100%	100,00%

Capaian indikator kinerja tahun 2021 dari tabel di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Terasilitasinya pemberian izin praktik/kerja tenaga kesehatan yang telah memenuhi kompetensi
 Beberapa tenaga kesehatan memerlukan surat ijin praktik/kerja dalam melakukan pekerjaannya. Dalam tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri melalui seksi Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan telah menerbitkan 1189 surat ijin praktik/kerja yaitu melebihi target 89 surat ijin praktik/kerja.

Diagram 3. Surat ijin praktik/kerja tenaga kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2019, 2020 dan 2021



Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2019, 2020 dan 2021

Walaupun secara target memenuhi tetapi secara kuantitas dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan karena masa berlaku surat ijin praktik atau kerja bisa 5 (lima) tahun sehingga tergantung dari masa habis surat ijin praktik atau kerja tenaga Kesehatan.

- b. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dengan melakukan supervisi terkait ijin praktik, menertibkan pengisian SISDMK sebagai pusat data tenaga kesehatan di Kabupaten Kediri

B. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota terdiri atas 3 Sub Kegiatan yaitu : 1) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 2) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar; 3) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	IKM	Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah	100%	100%	100,00%
		Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDM di Faskes Pemerintahan	100%	100%	100,00%
		Terpenuhinya 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar di Puskesmas	100%	100%	100,00%
		Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDM di Faskes Pemerintahan	100%	100%	100,00%

Uraian capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Tersusun Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di Faskes pemerintah
 Penyusunan rencana kebutuhan dan pendayagunaan SDM dalam tahun yaitu 2021 telah disusun dengan baik menjadi 1 (satu) dokumen laporan rencana kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan di Kabupaten Kediri.
- b. Terpenuhinya tenaga kesehatan sesuai standart ketenagaan minimal di Faskes pemerintah

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang sesuai standart ketenagaan minimal di faskes pemerintah yaitu 37 Puskesmas dan 2 rumah sakit sebanyak 100%. Tenaga kesehatan harus sesuai dengan latar belakang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan ijazah yang dikeluarkan institusi pendidikan serta sertifikat kompetensi yang dikeluarkan kolegium organisasi profesi terkait. Hal ini juga dapat dilihat pada persentase terpenuhinya 9 (sembilan) tenaga kesehatan strategis di Puskesmas.

- c. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDM di Faskes Pemerintahan dengan rutin melakukan supervisi terkait ijin praktik, menertibkan pengisian SISDMK sebagai pusat data tenaga kesehatan di Kabupaten Kediri

C. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 1 Sub Kegiatan yaitu : 1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	IKM	pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Keseahtan terlaksana	100%	100%	100,00%
		Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun	60	60	100,00%

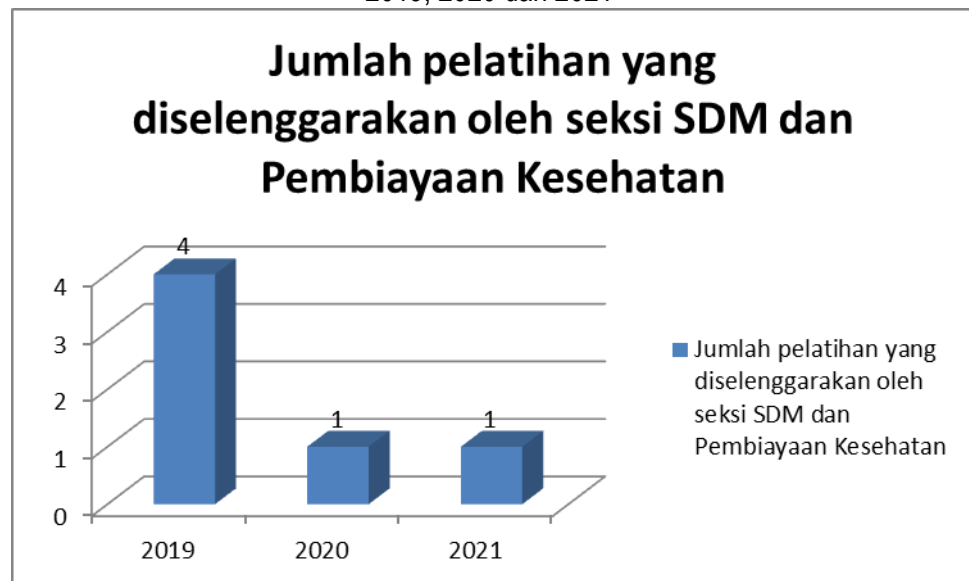
Uraian capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 pasal 203 disebutkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standart kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. Pada ayat 3 disebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi. Pada ayat 4 disebutkan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran (JPL) dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal ini Seksi Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan yang sesuai tupoksinya meningkatkan kompetensi ASN di wilayah kerjanya, memberikan kesempatan untuk pengiriman ASN pelatihan yang terakreditasi. Tahun 2020 ditargetkan ada 1 (satu) peningkatan kompetensi melalui Workshop yaitu Wokrshop tentang tatalaksana Covid-19. Selain itu dilakukan pengiriman pelatihan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ke Universitas Airlangga Surabaya.

Diagram 4. Jumlah Pelatihan yang diselenggarakan seksi SDM dan Pembiayaan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2019, 2020 dan 2021



Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2019,2020 dan 2021

Terjadinya penurunan target maupun penyelenggaraan pelatihan dikarenakan adanya pandemi Covid-19, hal ini menyebabkan berubahnya anggaran dan fokus kerja tenaga kesehatan.

b. Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Puskesmas

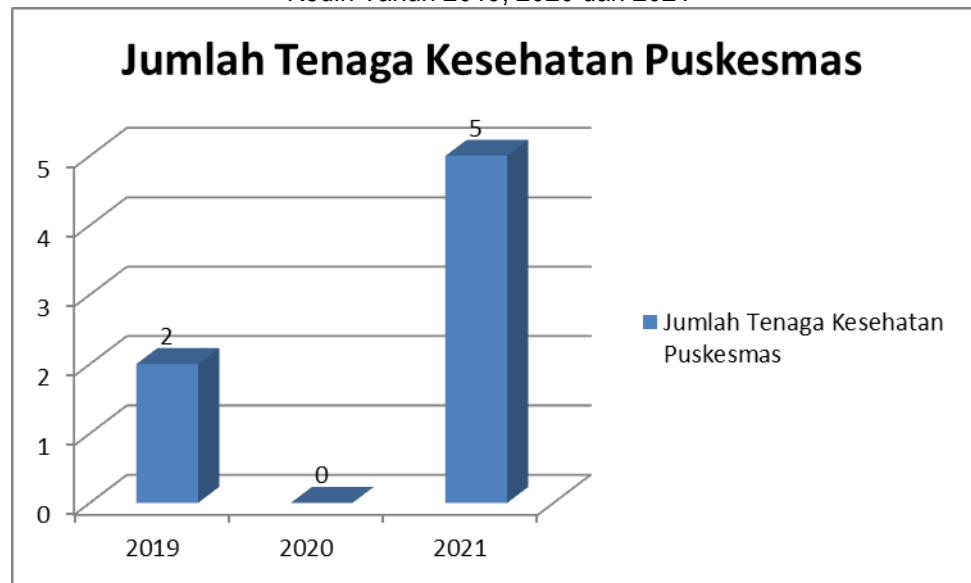
Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan RI No. 658/Menkes/SK/IV/2005, tentang Pedoman Penilaian tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas yang mana bertujuan untuk meningkatkan motivasi, dedikasi dan loyalitas tenaga kesehatan Puskesmas untuk lebih meningkatkan prestasi kerjanya, meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan strata pertama melalui Puskesmas, meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan di dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya, meningkatnya minat tenaga kesehatan untuk bekerja di Puskesmas, timbulnya kompetisi yang sehat di antara tenaga kesehatan dalam upaya meningkatnya pelayanan kesehatan strata pertama di Puskesmas maka diadakannya pemilihan tenaga kesehatan Puskesmas teladan yang terdiri dari kategori:

- Dokter Umum

- Dokter Gigi
- Perawat
- Bidan
- *Nutrisionist*
- Kesehatan Masyarakat
- Kesehatan Lingkungan
- Ahli Teknis Laboratorium Medis
- Kefarmasian

Dalam masa pandemi Covid-19, pemilihan tenaga kesehatan teladan difokuskan pada tenaga Puskesmas terbaik dalam menangani Covid-19. Dalam kategori diatas minimal pemilihan nakes teladan sebanyak 5 nakes teladan (5 kategori) yaitu hasil pemilihan tenaga kesehatan Puskesmas teladan yang menangani Covid-19 tahun 2021 yaitu Kategori Dokter (dr. Rini Hidayat dari UPTD Puskesmas Ngasem), Kategori Bidan (Silatur Rohmah dari UPTD Puskesmas Papar), Kategori Perawat (Pukes Harnandri Haksa dari UPTD Puskesmas Puncu), Kategori Tenaga Kesehatan Lingkungan (Wiwik Indrawati dari UPTD Puskesmas Pagu), Tenaga ATLM (Pujiani dari UPTD Puskesmas Gampeng), Kategori Kefarmasian (Daril Rahmatullah dari Puskesmas Kunjang) sehingga realisasi dari indikator jumlah tenaga kesehatan Puskesmas teladan yang terpilih 100%. Hasil pemilihan tenaga kesehatan teladan Puskesmas di tingkat propinsi Kategori Bidan (Silatur Rohmah dari UPTD Puskesmas Papar) menjadi Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Juara 2 tingkat propinsi Jawa Timur.

Diagram 5. Jumlah Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Kabupaten Kediri Tahun 2019, 2020 dan 2021



Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2019, 2020 dan 2021

Tahun 2019 terpilih 2 (dua) tenaga kesehatan teladan Puskesmas, tahun 2020 tidak ada pemilihan tenaga kesehatan dikarenakan terjadi pandemi Covid-19. Tahun 2021 diadakan kembali pemilihan tenaga kesehatan teladan Puskesmas sebanyak 5 tenaga kesehatan dan berhasil membawa juara 2 tingkat propinsi.

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Dalam program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman didukung oleh 3 kegiatan yaitu 1). Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, U MOT; 2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; 3) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Masing masing kegiatan mempunyai sub kegiatan yang menjabarkan pelaksanaan program kegiatan.

Realisasi indikator kinerja program pada tahun 2021 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	IKM	Prosentase pemberian rekomendasi apotek, TO, tk. Akles dan optikal, UMOT	75%	100%	133,33%
		Prosentase produk makanan minuman tertentu yang bersertifikat p-irt	75%	100%	133,33%

A. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT

Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT terdiri atas 1 Sub Kegiatan yaitu : Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Realisasi indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	IKM	Jumlah rekomendasi apotek, to, tk. Akles dan optikal, umot yang diterbitkan	20	20	100,00%
		Presentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat	25%	61,90%	247,60%

		Tradisional (UMOT) yang dibina dan diawasi			
		Jumlah rekomendasi apotek, to, tk. Akles dan optikal, umot yang memenuhi persyaratan	20	20	100%
		Jumlah apotek, to, tk. Akles dan optikal, umot yang di bina dan di awasi	40	130	325%

Uraian capain indikator di atas adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2021 jumlah rekomendasi apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, umot yang diterbitkan sebanyak 20 rekom karena sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pada tahun 2021 dilakukan pengawasan terhadap 130 apotek, toko obat, dan UMOT.

B. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga terdiri atas 1 Sub Kegiatan yaitu Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Realisasi indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran	Indikator	Indikator	Target	Realisasi	%
---------	-----------	-----------	--------	-----------	---

Strategis	Kinerja sasaran	kinerja program	2021	2021	capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	IKM	Jumlah sertifikat p-irt yang diterbitkan	120	120	100,00%
		Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya	120	120	100,00%

Pada tahun 2021 sebanyak 120 produsen industri rumah tangga telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya sehingga sertifikat PIRT dapat diterbitkan.

C. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga mempunyai 1 Sub Kegiatan yaitu Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

Berikut capaian indikator kinerja tahun 2021:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan	IKM	Prosentase pemeriksaan produksi makanan	3%	3%	100,00%

kesehatan		minuman industri rumah tangga			
	Persentase Keluarga Sehat	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi	100%	100%	100,00%

Pada tahun 2021 semua produsen industri rumah tangga dilakukan pembinaan dan pengawasan agar selalu terpantau kualitas produksinya.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terdiri atas 3 Kegiatan yaitu : 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Masing masing kegiatan mempunyai sub kegiatan yang menjabarkan pelaksanaan program kegiatan.

Realisasi indikator kinerja program pada tahun 2021 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Keluarga Sehat	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	65,03%	83,00%	127,63%
		persentase desa-kelurahan	15%	15,11%	99,28%

		siaga aktif			
		frekuensi bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang dilakukan selama satu tahun	2 kali dalam 1 tahun	2 kali dalam 1 tahun	100,00%
		persentase desa-kelurahan siaga aktif	15%	15,11%	99,28%
		frekuensi bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang dilakukan selama satu tahun	2 kali dalam 1 tahun	2 kali dalam 1 tahun	100,00%

A. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 1 Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Capaian kinerja tahun 2021 disajikan dalam table berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Keluarga Sehat	frekuensi kegiatan tim pokjanel tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun	2 kali dalam 1 tahun	1 kali dalam 1 tahun	50,00%
		jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/	2 MOU/PKS	0	0,00%

		organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM			
--	--	---	--	--	--

Uraian capaian indikator kinerja dari tabel di atas dijabarkan sebagai berikut :

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan kemitraan maka dibentuklah tim pokjnal tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Semua tim diharapkan selalu bersinergi dalam meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Upaya upaya yang dilakukan tahun 2021 diantaranya revitalisasi posyandu dalam rangka meningkatkan strata posyandu, workshop desa siaga aktif bagi penentu kebijakan di desa, revitalisasi poskesdes dalam rangka peningkatan strata strata desa siaga.

Workshop dan kemitraan ormas dengan UKBM, Wokrshop Saka Bhakti husada

B. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 1 Sub Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

Realisasi indikator kinerja program pada tahun 2021 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Keluarga Sehat	Jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun	5 Media	5 Media	100,00%
		Jumlah tema KIE program	5 Tema	5 Tema	100,00%

		prioritas yang dipromosikan melalui media			
		Persentase rumah tangga sehat (10 indikator)	60%	52,57%	87,62%

Target jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun sebanyak 5 media hasil yang diperoleh sebanyak 5 media, hasil capaian yang diperoleh 100 %

Target jumlah tema KIE program prioritas yang dipromosikan melalui media sebanyak 5 tema dengan realisasi sebanyak 5 tema, capaian hasil yang diperoleh 100 %

Prosentase Rumah Tangga sehat yaitu rumah tangga yang memenuhi 10 indikator PHBS rumah tangga (persalinan ditolong oleh nakes, bayi diberi ASI eksklusif, menimbang bayi/balita, menggunakan air bersih, mencuci tangan pakai air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik dirumah, makan buah dan sayur tiap hari, aktivitas fisik tiap hari, tidak merokok di dalam rumah) pada kurun waktu tertentu mencapai hasil 83,44 % telah mencapai target, dari target 63 %. Hal ini didukung kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat guna mencegah tertularnya pandemic covid-19.

Tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain

- a. Pelaksanaan germas aktifitas fisik, pemeriksaan berkala, serta edukasi gizi seimbang di tingkat kabupaten kota
- b. Kampanye lokal dalam mendukung pelaksanaan germas penyediaan media cetak, media luar ruang dan media social
- c. Sosialisasi dan advokasi pengukuran kebugaran jasmani melalui aplikasi SIPGAR tingkat puskesmas
- d. Meningkatkan koordinasi lintas sector
- e. Peningkatan pengetahuan PHBS di institusi kegiatan
- f. Kampanye local dalam mendukung pelaksanaan germas
- g. Sosialisasi implementasi KPP bagi kader

C. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki 1 Sub Kegiatan yaitu Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.

Realisasi indikator kinerja program pada tahun 2021 akan disajikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Indikator kinerja program	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Keluarga Sehat	Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa	100%	100%	100,00%
		Cakupan promosi kesehatan tingkat desa	100%	100%	100,00%
		Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina	100%	100%	100,00%
		Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	87,36%	88,35%	101,13%
		Persentase poskesdes purnama mandiri (PURI)	15,22%	26,22%	172,27%
		persentase poskestren purnama mandiri (PURI)	30,43%	46,87%	154,03%
		persentase saka Bhakti Husada (SBH) purnama Mandiri (PURI)	14,71%	10,00%	67,98%

		persentase desa-kelurahan siaga aktif	15%	15,11%	99,28%
--	--	---------------------------------------	-----	--------	--------

Dari table di atas diketahui bahwa :

1. Target Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa sebesar 100 %, dengan hasil capaian 100 %.
2. Target cakupan promosi kesehatan tingkat desa sebesar 100 %, dengan hasil capaian 100 %
3. Target cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina sebesar 100 %, dengan hasil capaian 100 %
4. Target prosentase Posyandu Purnama Mandiri sebesar 87,36 % dengan realisasi sebesar 88,35 %, hasil capaian yang diperoleh 101,13 %
5. Target prosentase Poskestren Purnama Mandiri sebesar 30,43 % dengan realisasi sebesar 46,87 %, hasil capaian yang diperoleh 154,02 %
6. Target prosentase Poskesdes Purnama Mandiri sebesar 15 % dengan realisasi sebesar 26,22 %, hasil capaian yang diperoleh 174,80 %
7. Target prosentase SBH Purnama Mandiri sebesar 14,71 % dengan realisasi sebesar 10 %, hasil capaian yang diperoleh 67,98 %
8. Target prosentase Desa Siaga aktif (Purnama Mandiri) sebesar 15,22 % dengan realisasi sebesar 15,11 %, hasil capaian yang diperoleh 99,28 %

Upaya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian antara lain :

1. Meningkatkan monitoring pelaksanaan kegiatan UKBM di masyarakat
2. Pembinaan taman posyandu, desa siaga aktif, serta penyelenggaraan SBH di tingkat kwaran
3. Pelatihan komunikasi perubahan perilaku stunting bagi kader

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

Untuk melihat perbandingan realisasi kinerja dari tahun sebelumnya apakah ada perkembangan dan bagaimana progresnya dari Tahun 2020 ke Tahun 202, akan disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1.IKM	83,79	83,86	80,19	76,75
		2. Persentase Keluarga Sehat	100%	100%	100%	100

Indeks kepuasan masyarakat adalah sebuah studi yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi, setiap tahun dinas kesehatan juga mengadakan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh unit pelayanan yang ada di Dinas Kesehatan.

Dalam survey ini hasil yang di dapat adalah 84,02 untuk tahun 2017 dan 81,3 pada tahun 2018. Dan pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan dengan nilai IKM 78,37. Tahun 2020 nilai IKM mengalami kenaikan yaitu 80,19. Tahun 2021 nilai IKM turun kembali yaitu 76,75. Naik turunnya Nilai IKM selama 5 tahun terakhir dikarenakan beberapa unsur yang dinilai dalam survey ini yaitu 1) Persyaratan pelayanan, 2) Prosedur pelayanan, 3) Kecepatan waktu pelayanan, 4) Kewajaran biaya pelayanan, 5) Kesesuaian produk pelayanan, 6) Kemampuan petugas pelayanan, 7) Kesopanan dan keramahan petugas, 8) Sarana dan prasarana pelayanan, 9) Penanganan pengaduan.

Penurunan nilai IKM pada tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

Pada aspek kecepatan pelayanan nilainya menurun dikarenakan menurut pelanggan dimulai dari waktu datang pertama kali sampai dengan mendapatkan produk layanan dirasa lebih lama. Rata-rata waktu yang ditetapkan Dinas Kesehatan dalam menyelesaikan pelayanan sekitar 7 (tujuh) hari.

Beberapa hal yang menyebabkan pelayanan kepada pelanggan lebih lama antara lain :

- a. Pada beberapa kasus pelayanan bisa melebihi 7 hari.
- b. Customer mulai membandingkan waktu pelayanan dengan instansi lain yang bisa lebih cepat

- c. Waktu tunggu untuk direspon/kontak dengan petugas dirasa lebih lama. Dimulai datang ke Dinas Kesehatan sampai bisa berkontak langsung dengan petugas layanan.

Khusus untuk program keluarga sehat, pada tahun 2016 sudah dilaksanakan pendataan keluarga sehat untuk satu puskesmas satu desa, tetapi belum dilakukan rekap dan entry data. Untuk tahun 2017 sudah dilakukan pendataan sekaligus entry data, dari target 10% pada tahun 2017 dinas kesehatan sudah mencapai 32,75 persen, artinya ada sebanyak 32,75% keluarga yang ada di kabupaten Kediri yang sudah di data dalam program keluarga sehat. Untuk tahun 2018 ditargetkan 26% keluarga sudah didata. Hasil yang dicapai sebanyak 326.686 kepala keluarga (64,21%) telah dilakukan survey keluarga sehat. Namun yang terbaca di Dasbord hanya terbaca 97.370 KK dengan jumlah keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat >0,800 sebanyak 12.469 atau 0,128 (12,8%). Pada tahun 2019 sebanyak 90% keluarga sudah didata, dengan capaian nilai IKS sehat sebesar 14%. Sedangkan tahun 2020 dan 2021 sudah memenuhi target dimana semua keluarga sudah terdata (100%) dalam aplikasi Keluarga Sehat dengan IKS sebesar 15%.

Kedua belas indikator utama tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) tercapai 43 %
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan tercapai 91 %
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 96 %
4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif 83 %
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan 91 %
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 31,6 %
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur 14,6 %
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan 14,2 %
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok 46 %
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 37,7 %
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih 98,3 %
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat 92,6%

Dengan permasalahan kecilnya angka IKS di kabupaten Kediri perlu monitoring yang kuat dan terus menerus dari tim Bina Wilayah dalam hal intervensi juga di butuhkan komitmen yang kuat dari seluruh lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan capaian.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN AKHIR TAHUN RESTRA

Untuk membandingkan kinerja yang di capai pada tahun 2021 dengan target yang ada di renstra akan disajikan dalam tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
2.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1.IKM	83,86	76,75	91,52
		2. Persentase Keluarga Sehat	100%	100%	100%

Untuk indikator IKM target akhir tahun renstra adalah 83.86 dan pencapaian sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 76,75. Nilai IKM ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017-2020 meskipun masih di rentang nilai Baik.

Untuk indikator keluarga sehat, sampai dengan tahun 2021 rumah tangga yang dilakukan pendataan sudah mencapai 100% yang artinya semua rumah tangga yang ada sudah dilakukan pengukuran untuk program keluarga sehat. Sedangkan untuk indeks keluarga sehat masih mencapai 15%.

D. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan pelayanan kesehatan, bidang dan seksi di Dinas Kesehatan juga membutuhkan anggaran, untuk mengetahui anggaran yang disediakan selama tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	IKM	47.728.132.510,00	32,93%
		Persentase Keluarga Sehat	97.215.527.027,00	67,07%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa presentase untuk mendukung sasaran strategis IKM mencapai 32,93 % dari total belanja semua program teknis tahun 2021, sedangkan untuk mendukung sasaran strategis Presentase Keluarga Sehat saat ini mencapai 67,07% dari total belanja program teknisSKPD.

E. PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Dari alokasi anggaran per program yang ada sampai dengan tahun 2021, rata-rata sudah mencapai diatas 70% realisasinya, untuk lebih menggambarkan realissai anggaran yang mendukung indikator kinerja kesehatan selama tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian%	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	IKM	83,96	76,75	91,45 %	47.728.132.510,00	36.982.213.885,91	77,49%
		Persentase Keluarga Sehat	100%	100%	100%	97.215.527.027,00	55.258.528.568,03	56,84%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis sudah mencapai hampir 100% untuk IKM dan sudah 100% semua keluarga didata kesehatannya. Untuk realisasai fisik penyerapan anggaran pada tahun 2021 untuk indikator IKM sudah mencapai 77,49% dari anggaran yang dialokasikan, sedangkan untuk penyerapan anggaran indikator keluarga sehat sudah mencapai 56,84% dari pagu anggaran.

F. EFISIENSI PENYERAPAN ANGGARAN

Untuk melihat bagaimana efisiensi anggaran jika dibandingkan dengan kinerja program dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian kinerja	% penyerapan anggaran	tingkat efisiensi
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1.IKM	91,45	77,49	13,96
		2. Persentase Keluarga Sehat	100	56,84	43,16

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efisiensi kinerja untuk indikator kinerja IKM sudah mencapai 13,96 yang berarti bahwa dengan serapan anggaran sebanyak 77,49% bisa mencapai capaian kinerja sebesar 91,45%. Sedangkan untuk presentase keluarga sehat sudah mencapai efisiensi sebesar 43,16 yang artinya dengan serapan anggaran sebesar 56,84% sudah bisa mencapai kinerja sebesar 100%.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dapat disimpulkan bahwa sasaran –sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada rencana kinerja tahunan dikategorikan **BAIK**.

Yang menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri pada tahun 2021 adalah penanggulangan Pandemi Covid-19 yang sudah hampir 1 tahun berjalan dengan mengencarkan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) di berbagai media sosial serta bekerja sama dengan lintas sektor terkait. Selain itu juga tetap melakukan upaya promotif preventif dengan protokol kesehatan yang ketat terutama dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Pada tahun 2021 ini sasaran strategis adalah IKM dan Prosentase keluarga sehat, yang capaian kinerjanya sudah mencapai hampir 100%. IKM adalah pengukuran untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya, sedangkan Indeks Keluarga Sehat adalah pengukuran derajat kesehatan keluarga yang dilakukan melalui survey Keluarga Sehat yang dilaksanakan tahun 2016-2021.

KESIMPULAN

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2017- 2021 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Masih banyak permasalahan yang belum

tertuntaskan dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2021. Diantaranya masih belum stabilnya penurunan AKI dan AKB, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, masih banyaknya masyarakat miskin di Kabupaten Kediri yang belum masuk menjadi peserta PBI JKN/ Jamkesda Provinsi Jatim, serta terjadinya KLB Covid-19.

Tahun 2021 ini kegiatan diprioritaskan untuk penanggulangan Covid-19.

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk penanggulangan KLB adalah :

- a. Dinas kesehatan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk mengkoordinir kegiatan dalam rangka menangani kasus di masing masing wilayah kerja puskesmas.
- b. Koordinasi antara TRC dengan Puskesmas, Lintas Program terkait serta lintas sektor Untuk memutus rantai penularan Covid-19 dalam hal mengkampanyekan 3 M (Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak)
- c. Bersama dengan pihak pihak terkait, dilaksanakan tracing, testing dan treatment (3T) apabila terjadi kasus di wilayah tersebut dengan didanai dari APBD dan Biaya Tak Terduga (BTT)
- d. Melakukan pengiriman specimen ke BBLK Surabaya
- e. Melakukan pertemuan dengan petugas surveilans puskesmas dan lintas program untuk mengintensifkan sosialisasi tentang Covid-19 dan penanganannya, mengingat kasus ini adalah kasus baru
- f. Melakukan pertemuan dengan kontak person rumah sakit
- g. Melaksanakan kunjungan Rumah sakit (SARS) untuk mendeteksi secara dini kasus KLB yang ada di Rumah sakit
- h. Melakukan Bimbingan Teknis pada saat terjadi kasus KLB
- i. Memberikan rekomendasi dari hasil pengamatan yang dilakukan.

Hambatan yang ditemukan pada saat penanggulangan KLB adalah ;

- a. Masih kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam penanggulangan KLB (Surveilans berbasis Masyarakat)

- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan 3 M (Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) dalam perilaku sehari-hari di masa pandemi ini.

Keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sampai dengan Tahun 2021 antara lain :

1. 37 Puskesmas berstatus sebagai pelayanan prima, 2 puskesmas bersertifikat ISO, 37 Puskesmas telah terakreditasi.
2. Puskesmas Ngasem, Puskesmas Ngadi dan Puskesmas Semen mendapatkan penghargaan akreditasi Paripurna.
3. Penghargaan Program Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Provinsi Jawa Timur Kategori Peringkat Kinerja Terbaik III
4. Piagam Bintang Satu Keamanan Pangan untuk Industri Rumah Tangga Pangan "SINCAN COKLAT" Desa Sitimerto Kecamatan Pagu dan "PRIMARASA FOOD INDUSTRY" Jl. Mataram 178 Kabupaten Kediri.
5. Pencapaian Swasti Saba Wiwerda Kabupaten Sehat 6 Tatanan.
6. Penghargaan "KBK The Pocket" untuk UPTD Puskesmas Ngadi Atas Prestasi Kompetisi Kelompok Budaya Kerja (KBK) Tingkat Provinsi Jawa Timur sebagai 20 Terbaik Kategori Pelayanan Jasa Non Medis
7. Penghargaan "KBK The Finest Tree" untuk UPTD Puskesmas Mojo Atas Prestasi Kompetisi Kelompok Budaya Kerja (KBK) Tingkat Provinsi Jawa Timur sebagai Harapan II Kategori Pelayanan Administrasi
8. Penghargaan "Grebek Dahak TB" UPTD Puskesmas Ngasem sebagai Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur Kategori Kesehatan

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2021 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kediri pada umumnya dan Dinas Kesehatan pada khususnya.

**PRESTASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI**



**Penghargaan “Program Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi”
Provinsi Jawa Timur Peringkat Kinerja Terbaik III**



**Penghargaan "Swasti Saba Wiwerda"
Kabupaten Sehat dengan 6 Tatanan**



**Penghargaan "Grebek Dahak TB" UPTD Puskesmas Ngasem
Sebagai TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur
Kategori Kesehatan**



**Penghargaan "KBK The finest Tree" untuk Puskesmas Mojo
Atas Prestasi Kompetisi Kelompok Budaya Kerja (KBK)
Tingkat Provinsi Jawa Timur**



**Penghargaan "KBK The Pocket" untuk Puskesmas Ngadi
Atas Prestasi Kompetisi Kelompok Budaya Kerja (KBK)
Tingkat Provinsi Jawa Timur**



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



KEMENTERIAN KESEHATAN
KOMISI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Sertifikat Akreditasi

NOMOR : YM.02.01/VI.14/933/2019

diberikan kepada :

PUSKESMAS SEMEN

Nomor Registrasi : P3506020101(1032521)

Alamat : Jl. Argo Wilis No.127, Kec. Semen, Kediri,
Provinsi Jawa Timur

Berlaku : 14 September 2019 s/d 14 September 2022

Sebagai pengakuan bahwa fasilitas kesehatan telah memenuhi
Standar Akreditasi dan dinyatakan lulus :

PARIPURNA

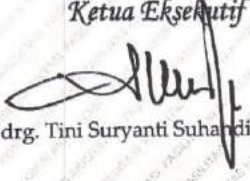


Jakarta, 14 Oktober 2019

Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Ketua Eksekutif




drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes

Scanned by CamScanner

Penghargaan untuk Puskesmas Semen sebagai Puskesmas Paripurna



BADAN POM

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA**

Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya 60286
Telp. (031) 5020575, 5022815 | ULPK. (031) 5048833 | Fax. (031) 5015486
e-mail : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpk_sby@yahoo.co.id | website : www.pom.go.id

Nomor : PW.04.01.106.1063.11.19.3917 Surabaya, 20 November 2019
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Surveilans dalam Rangka
Piagam Bintang Satu Keamanan Pangan

Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
(RSUD Simpang Lima Gumul)
Jl. Galuh Candrakirana Kab Kediri

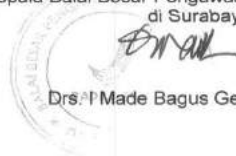
Berdasarkan hasil Surveilans dalam rangka Piagam Bintang Satu Keamanan Pangan yang dilaksanakan oleh petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada bulan Oktober 2019 di wilayah Kabupaten Kediri, bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Nama Industri : SINCAN COKELAT
Alamat : Jl. Makmur RT 003 RW 002 Ds Sitimerto Kec Pagu, Kab Kediri
Jenis pangan : Cokelat
No. PIRT : 2093506040049-23
Nama pemilik : Tri Handayani Setyaningsih
2. Nama Industri : PRIMARASA FOOD INDUSTRY
Alamat : Jl. Mataram 178 Kabupaten Kediri
Jenis pangan : Kecap
No. PIRT : MD 157213001237
Nama pemilik : Sukma Dewi

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) tersebut masih memenuhi syarat untuk mempertahankan Piagam Bintang Satu Keamanan Pangan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Surabaya



Drs. Made Bagus Gerametta, Apt.

**Piagam Bintang Satu Keamanan Pangan untuk Industri Rumah Tangga
Pangan "SINCAN COKELAT" Desa Sitimerto Kecamatan Pagu dan
"PRIMARASA FOOD INDUSTRY" Jl. Mataram 178 Kabupaten Kediri.**



LKjIP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2021

Dinas Kesehatan

Kabupaten Kediri



LKjIP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2021

Dinas Kesehatan

Kabupaten Kediri